

**STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI
PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025
(Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)**

SKRIPSI



MUHAMMAD SATIO

NPM: 221160043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2026**

**STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI
PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025
(Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)**

SKRIPSI



MUHAMMAD SATIO

NPM: 221160043

**Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

BATAM

2026

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk Kota Batam memicu tingginya laju alih fungsi lahan agraris, menempatkan daerah pada posisi kerentanan pangan di mana petani lokal termasuk Kelompok Tani Pokusma dan Kelompok Wanita Tani (KWT) secara akumulatif hanya mampu memenuhi 25% kebutuhan pangan harian penduduk.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani Pokusma pada tahun 2025 guna meningkatkan ketahanan pangan hortikultura.

Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa strategi DKPP dieksekusi melalui tiga pilar utama.

Eksekusi yang dilakukan adalah pertama, pilar *enabling* terwujud melalui proaktivitas penyuluh pertanian lapangan yang sukses meruntuhkan asimetri informasi dan membangun modal sosial. Kedua, *empowering* dilakukan melalui distribusi Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) yang memangkas 50% biaya operasional dan memicu lonjakan produksi cabai Pokusma sebesar 88,5%, meskipun memunculkan *opportunity cost* pada penurunan panen komoditas lain. Ketiga, *protecting* menunjukkan hasil paradoksal dimana dinas sukses menjaga stabilitas harga melalui program "Cabai Corner", namun gagal dalam melindungi legalitas 8 hektare lahan yang diolah oleh Kelompo Tani Pokusma.

Disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan secara operasional mikro sangat berhasil memandirikan Kelompok Tani Pokusma, namun secara makro terdistorsi oleh ketiadaan jaminan hukum tata ruang. Penelitian ini merekomendasikan Kelompok Tani Pokusma agar proaktif mengurus perizinan pemanfaatan lahan secara legal dan bagi Pemko Batam dan BP Batam untuk segera menetapkan legalitas *Food Estate*.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan, Kelompok Tani, Ketahanan Pangan.

ABSTRACT

The population growth in Batam City triggers a high rate of agricultural land conversion, placing the region in a position of food vulnerability where local farmers, including the Pokusma Farmer Group and Women Farmer Groups (KWT), cumulatively can only fulfill 25% of the population's daily food needs.

This study aims to analyze the strategy of the Department of Food Security and Agriculture (DKPP) of Batam City in empowering the Pokusma Farmer Group in 2025 to increase horticultural food security.

Employing a qualitative method through a case study approach with in-depth interview techniques, this research found that the DKPP's strategy was executed through three main pillars.

The execution carried out is, first, the enabling pillar was realized through the proactivity of agricultural extension workers who successfully dismantled information asymmetry and built social capital. Second, empowering was carried out through the distribution of Agricultural Production Facilities (Saprotan), which cut operational costs by 50% and triggered an 88.5% surge in Pokusma's chili production, although it created an opportunity cost resulting in a decline in the harvest of other commodities. Third, protecting showed paradoxical results where the department successfully maintained price stability through the "Cabai Corner" program, but failed to protect the legality of the 8 hectares of land cultivated by the Pokusma Farmer Group.

It is concluded that the empowerment strategy at the operational micro-level is highly successful in fostering the independence of the Pokusma Farmer Group, but at the macro-level, it is systematically distorted by the absence of spatial legal guarantees. This research recommends the Pokusma Farmer Group to be proactive in processing legal land utilization permits, and for the Batam City Government and BP Batam to immediately establish the legality of a Food Estate.

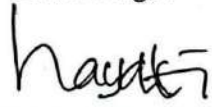
Keywords: *Empowerment Strategy, Farmer Groups, Food Security.*

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025 (STUDI KASUS KELOMPOK TANI POKUSMA)

MUHAMMAD SATIO
NPM: 221160043

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan
Tanggal: 5 Agustus 2026

No.	Nama	NIDN	Tanda Tangan
1.	<u>Nurhayati, S.IP., M.I.P</u> <i>Penguji I</i>	1005058704	
2.	<u>Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si</u> <i>Penguji II</i>	1026048402	
3.	<u>Ronald Parlindungan Hasibuan,</u> <u>S.IP., M.TQM (Hons)</u> <i>Penguji III</i>	1028116901	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Riau Kepulauan


Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN.1013128701

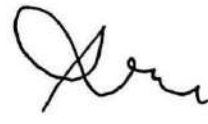
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan


Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN.1026048402

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN
SEMINAR SKRIPSI**

**STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI
PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025
(STUDI KASUS KELOMPOK TANI POKUSMA)**

**MUHAMMAD SATIO
NPM: 221160043**

	Tanda Tangan	Tanggal
Dosen Penguji I		
<u>Nurhayati, S.IP., M.I.P</u>		<u>13 08 26</u>
NIDN: 1005058704		
Dosen Penguji II		
<u>Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si</u>		<u>24/8-26</u>
NIDN: 1026048402		
Dosen Penguji III		
<u>Ronald Parlindungan Hasibuan, S.IP.,</u>		<u>11 08 2026</u>
<u>M.TQM (Hons)</u>		
NIDN: 1028116901		

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI
STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI
PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025
(STUDI KASUS KELOMPOK TANI POKUSMA)

MUHAMMAD SATIO
NPM: 221160043

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dihadapkan kepada Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kepulauan

Pembimbing I

Nurhayati, S.IP., M.I.P
NIDN.1005058704

Tanda Tangan



Tanggal

28 Juli 2026

Pembimbing II

Ronald Parlindungan Hasibuan, S.IP., M.TQM
(Hons)
NIDN.1028116901



27 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan




Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN.1026048402

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya Skripsi dengan judul “Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Peningkatan Produksi Tanaman Hortikutura Melalui Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)” adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Baik di Universitas Riau Kepulauan Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gasasn, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lainnya kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam tulisan ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penvimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telahsaya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Batam, 5 Agustus 2026




Muhammad Satio
221160043

KATA PENGHANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Melalui Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)” tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Riau Kepulauan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Askarmin Harun, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Riau Kepulauan.
2. Bapak Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan arahan administratif.
3. Ibu Nurhayati, S.IP., M.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ronald Parlindungan Hasibuan, S.IP., M.TQM (Hons) selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar memberikan waktu, ilmu, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, khususnya kepada Meili Suryanti, SP, MM, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kota Batam yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
5. Kedua Orang Tua Tercinta dan Keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan moral, materiil, serta doa yang tidak putus-putusnya demi keberhasilan penulis.
6. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Batam, 5 Agustus 2026



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN HASI REVISI.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGHANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumuasan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Definisi Konseptual.....	20
D. Definisi Oprasional.....	21
E. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data.....	25
D. Informan.....	26
E. Teknik Pengambilan Data	28
F. Teknik Analisi Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian.....	31
B. Deskripsi Hasil Peneliatian	47
C. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Peringkat skor IKP Kota Batam Secara Nasional.....	2
Tabel 1 2 Tabel Total Penduduk Kota Batam Tahun 2021-2025 dan persentase peningkatan penduduk.	3
Tabel 1 3 Tabel Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Batam 2023-2025.	5
Tabel 1 4 Tabel peningkatan jumlah Kelompok Tani Kota Batam dari tahun 2022- 2024.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. 2 Definisi Oprasional Variabel Penelitian.....	22
Tabel 3. 1 Tabel Informan.....	28
Tabel 4. 1 Karakteristik Geografis dan Luas Wilayah Kota Batam.....	32
Tabel 4. 2 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	40
Tabel 4. 3 Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Batam 2023-2025.	64
Tabel 4. 4 Tabel jumlah bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam kepada kelompok tani Pokusma Pada tahun 2025.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Batam Kepulauan Riau	31
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	35
Gambar 4. 3 Mekanisme Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam.....	40
Gambar 4. 4 Pertemuan Petani Kota Batam dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.....	48
Gambar 4. 5 Bantuan Pupuk Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1. 1 Surat Rekomendasi Penelitian Terbitan DPMPTSP	83
Lampiran Gambar 1. 2 Surat Rekomendasi Penelitian Terbitan DPMPTSP	84
Lampiran Gambar 1. 3 Surat Permohonan Izin Penelitian	85
Lampiran Gambar 1. 4 Pedoman wawancara.....	86
Lampiran Gambar 1. 5 Pedoman wawancara.....	87
Lampiran Gambar 1. 6 Pedoman wawancara	88
Lampiran Gambar 1. 7 Pedoman wawancara.....	89
Lampiran Gambar 1. 8 Dokumentasi Wawancara dengan ketua kelompok tani Pokusma	90
Lampiran Gambar 1. 9 Dokumentasi Wawancara dengan staf DKPP Kota Batam	90
Lampiran Gambar 1. 10 Dokumentasi Wawancara dengan penyuluh Pertanian	91
Lampiran Gambar 1. 11 Bantuan bibit cabai Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma.....	91
Lampiran Gambar 1. 12 Bantuan Pupuk Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma.....	92
Lampiran Gambar 1. 13 Kebun olahan Ketua Kelompok tani Pokusma	92
Lampiran Gambar 1. 14 Gudang Penyimpanan Kelompok tani Pokusma.....	93
Lampiran Gambar 1. 15 FGD Kelompok tani dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ketahanan pangan merupakan isu global yang semakin mendesak dalam era perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan konflik rantai pasokan pangan dunia. Sebuah kajian literatur sistematis tentang pilar-ketahanan pangan di Indonesia menyimpulkan bahwa elemen ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, stabilitas, agensi pangan, dan keberlanjutan pangan menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung ketahanan pangan nasional¹. Studi lainnya mengungkap bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan terkait diversifikasi pangan, ketimpangan akses dan ketahanan pangan wilayah di tengah ketergantungan pada beberapa komoditas utama². Dalam konteks tersebut, konsep Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi instrumen penting bagi pemerintah maupun pemangku kebijakan untuk mengukur dan memonitor kondisi ketahanan pangan secara komprehensif, serta menetapkan intervensi kebijakan yang tepat.

Salah satu langkah yang digunakan pemerintah pusat untuk menekan kerentanan pangan di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini mendudukan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama, di mana pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Urgensi krusial ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintah pusat ke dalam agenda prioritas pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang berfokus pada lima pilar utama, di mana peningkatan aksesibilitas pangan yang

¹ Azhima, M. F., Deniar, S. M., Nugraha, T. C., & Salahudin, S. (2023). *Six Pillars of Global Food Security in Indonesia: A Systemic Literature Review*. *Sosiohumaniora*, 25 (3), 419–429. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.43549>

² Rozaki, Z., Siregar, H., Pratama, I. A., & Istiyanti, E. (2023). *Food security, diversification, and inequality: Indonesia in the era of economic recovery and high price trends*. In M. J. Cohen (Ed.), *Advances in food security and sustainability* (Vol. 8, pp. 43–94). Elsevier.

beragam serta penguatan produksi dan distribusi lokal menjadi instrumen vital untuk menekan angka kerentanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1.1 Peringkat skor IKP Kota Batam Secara Nasional

Tahun	Urutan Secara Nasional (Total Dari 98 Kota Lainya Yang Ada di Indonesia)	Skor Indeks Ketahanan Pangan (IPK)
2021	5	88.60
2022	9	85.23
2023	27	88.10
2024	26	88.83

Sumber: Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) 2025

Posisi Kota Batam secara nasional berdasarkan data yang dirilis oleh Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) terbilang terus menurun, dinamika Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Batam menunjukkan tren fluktuatif yang patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2021, Kota Batam menempati posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada peringkat kelima secara nasional dari total 98 kota di Indonesia dengan perolehan skor IKP sebesar 88,60. Namun demikian, posisi impresif ini tidak bertahan lama setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi peringkat kesembilan dengan skor yang juga terkoreksi menjadi 85,23.

Memasuki tahun 2023, peringkat Kota Batam secara nasional merosot cukup tajam ke posisi ke-27, meskipun secara akumulasi skor IKP sebenarnya mengalami pemulihan menjadi 88,10. Tren stagnasi peringkat ini terus berlanjut hingga data terakhir pada tahun 2024, di mana Kota Batam naik peringkat pada peringkat ke-26 secara nasional walau skor IKP-nya sedikit meningkat menyentuh angka 88,83. Fenomena ini memperlihatkan sebuah anomali yang krusial, di mana perbaikan skor IKP Kota Batam nyatanya belum mampu mengimbangi akselerasi pencapaian ketahanan pangan dari kota-kota lain di Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan bidang kerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mereka memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan

pengembangan sistem pangan daerah, melakukan pemantauan kondisi pangan, serta mendukung distribusi pangan kepada masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan tugasnya, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam perlu bekerjasama dengan berbagai elemen, baik itu masyarakat umum, kelompok masyarakat ataupun kesesama instansi pemerintahan.

Walaupun Ketahanan Pangan sudah menjadi permasalahan yang sangat diperhatikan, ketersediaan pangan di Kota Batam memiliki masalah yang sulit dihindari, yaitu dari tahun ketahun pertumbuhan penduduk terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh data dari BPS Kota Batam dari tahun 2018-2025.

Tabel 1.2. Tabel Total Penduduk Kota Batam Tahun 2021-2025 dan persentase peningkatan penduduk.

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Kenaikan Penduduk
2021	1.195.540	-
2022	1.230.216	2,89%
2023	1.256.610	3,19%
2024	1.276.930	0,59%
2025	1.365.266	6,92%

Sumber: BPS Kota Batam 2026, diakses pada Januari 2026

Kota Batam merupakan salah satu wilayah dengan dinamika kependudukan yang sangat pesat akibat posisinya sebagai kawasan industri strategis. Berdasarkan data kependudukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Batam terus mengalami eskalasi yang sangat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.195.640 jiwa, dan angka ini terus merangkak naik hingga menembus 1.365.266 jiwa pada paruh pertama tahun 2025. Laju pertumbuhan ini bahkan mencatatkan persentase lonjakan tertinggi sebesar 6,92% pada tahun 2025. Dinamika demografi yang masif ini tentu membawa implikasi langsung terhadap tatanan sosial, tata ruang, dan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Kondisi demografis tersebut memunculkan tantangan ganda bagi pembangunan kota. Pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan kebutuhan pangan yang juga meningkat, selain itu menyebabkan kebutuhan akan pemukiman dan sarana prasarana umum semakin meningkat pula, hal ini akan berimbas pada kecendrungan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mengalami percepatan³. Sehingga banyak lahan pertanian seperti lahan persawahan dan perkebunan yang dialihfungsikan menjadi areal perumahan, pabrik, wilayah perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Fenomena degradasi dan alih fungsi lahan ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi stabilitas ketahanan pangan lokal, mengingat Kota Batam pada dasarnya bukanlah wilayah dengan basis agraris yang luas.

Akibat nyata yang dialami kota Batam dari bertambahnya penduduk dan berkurangnya lahan tanam di kota Batam adalah tidak terpenuhinya target cadangan pangan pemerintah Kota Batam ditahun 2024. Dari data terakhir pada tahun 2024, jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebesar 33.230 ton dan hanya tersedia sebanyak 28.773 ton. Dengan pencapaian hanya sebesar 86,59% mencerminkan adanya potensi risiko ketahanan pangan⁴. Sementara target cadangan pangan di tahun 2025 diprediksi akan naik, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di kota Batam yang mencapai 6,92%.

³ Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). *Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya*. Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, 1(3), 76–84. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/download/82/20>

⁴ Pemerintah Kota Batam (2025), *RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029*

Tabel 1.3. Tabel Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Batam 2023-2025.

Jenis Tanaman	2023	2024	2025
Bawang Daun/ <i>Scallion</i> (kw/qui)	1.867	4.251	2.114
Bawang Merah/ <i>Shallots</i> (kw/qui)	123	999	268
Bawang Putih/ <i>Garlic</i> (kw/qui)	-	-	-
Bayam/ <i>Spinach</i> (kw/qui)	19.578,5	25.164	27.292
Buncis/ <i>String bean</i> (kw/qui)	665	2468	-
Cabai Rawit/ <i>Chili/Cayenne Pepper</i> (kw/qui)	5.049	9.018	7.390
Kacang Panjang/ <i>Long Beans</i> (kw/qui)	16.353	26.519	18.459
Kangkung/ <i>Water Spinach</i> (kw/qui)	20.965	26.782	25.349
Kembang Kol/ <i>Cauliflower</i> (kw/qui)	-	-	-
Kentang/ <i>Potato</i> (kw/qui)	-	-	-
Ketimun/ <i>Cucumber</i> (kw/qui)	19.624	25.465	19.058
Kubis/ <i>Cabbage</i> (kw/qui)	-	-	-
Labu Siam/ <i>Chayote</i> (kw/qui)	-	-	-
Melon/ <i>Melon</i> (kw/qui)	-	-	-
Paprika/ <i>Bell Pepper</i> (kw/qui)	-	-	-
Petsai/ <i>Sawi/Chinese Cabbage/mustard green</i> (kw/qui)	7.839	12.878	14.872
Semangka/ <i>Watermelon</i> (kw/qui)	1.809	2.870	3.800
Stroberi/ <i>Strawberry</i> (kw/qui)	-	-	-
Terung/ <i>Eggplant</i> (kw/qui)	1.017	4.540	1.590
Tomat/ <i>Tomato</i> (kw/qui)	156	2.613	1.222
Wortel/ <i>Carrot</i> (kw/qui)	-	60	70
Cabai Besar/ <i>TW/Teropong / Chili/Big chili</i> (kw/qui)	25	565	710
Cabai Keriting/ <i>Chili/Curly chili</i> (kw/qui)	21.205	34.312	23.952
Jamur Tiram/ <i>King Oyster Mushroom</i> (kw/qui)	0.5	-	-
Jamur Merang/ <i>Straw Mushroom</i> (kw/qui)	-	-	-
Jamur Lainnya/ <i>Mushroom</i> (kw/qui)	-	-	-

Sumber: BPS Kota Batam 2026, <https://batamkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/VFV4MmQxaG9kakZrVUdWeEx6aDFUMnN6WmpocVp6MDkjMw==/produksi-tanaman-sayuran-dan-buahbuahan-semusim-menurut-jenis-tanaman-di-kota-batam--2022.html> diakses pada 25 Februari 2026.

Tabel 1.3. merupakan tabel produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kota Batam 2023-2025, yang menunjukkan produksinya di tahun 2025 menurun. Dengan pertumbuhan penduduk di tahun 2025 hampir mencapai 7% yang merupakan kenaikan pertumbuhan penduduk terbesar dalam setidaknya 4 tahun terakhir, seharusnya jumlah produksi tanaman hortikultura juga meningkat agar mengimbangi dengan kebutuhan pangan yang meningkat. Hal ini merupakan gap utama dalam penelitian ini.

Di tengah penyusutan lahan produktif dan tingginya angka permintaan pangan, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan langkah manajerial yang adaptif. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memegang peran krusial sebagai ujung tombak perumusan kebijakan teknis di sektor agrikultur perkotaan. Mengingat ekstensifikasi lahan sudah tidak memungkinkan, strategi yang paling rasional adalah memaksimalkan kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, strategi penguatan sektor pangan di bidang ketersediaan melalui program pemberdayaan Kelompok Tani menjadi sangat relevan untuk diteliti, guna melihat sejauh mana intervensi pemerintah mampu menciptakan peningkatan produksi pangan anggota kelompok di tengah keterbatasan ruang kota.

Pada level kelompok masyarakat, pemberdayaan Kelompok Tani telah diidentifikasi sebagai strategi efektif dalam meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, serta memperkuat ekonomi rumah tangga petani.

Tabel 1.4. Tabel peningkatan jumlah Kelompok Tani Kota Batam dari tahun 2022-2024.

Tahun	Jumlah Kelompok Tani Kota Batam
2022	175 Kelompok
2023	203 Kelompok
2024	237 Kelompok
2025	255 Kelompok

Sumber: Data Satu Data Kota Batam, https://satudata.batam.go.id/data/detail/jumlahbpp2_cwkpp2cppldanppstahun2024semester120250kotabatami76nux, diakses pada Januari 2026

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memiliki tanggung jawab krusial dalam membina Kelompok Tani yang menjadi salah satu produsen hortikultura dan tanaman pangan demi peningkatan produksi pangan di suatu daerah. Berdasarkan publikasi *Kompilasi Data Data Satu Data Kota Batam*, tren pembentukan kelembagaan petani di Batam terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 175 Kelompok Tani, yang kemudian meningkat menjadi 203 kelompok pada 2023, dan mencapai 237 Kelompok Tani pada tahun 2024.

Besarnya jumlah kelompok tani ini menuntut strategi pemberdayaan yang terukur dari pemerintah daerah. Saat ini, arah pemberdayaan tidak hanya berfokus pada teknik budidaya, melainkan telah merambah pada kerja sama dalam pendistribusian hasil panen. Sebagai contoh, melalui program *Cabai Corner*, pemerintah berupaya memberdayakan kelompok tani di lahan seluas 15 hektare yang tersebar di Kecamatan Sei Beduk, Nongsa, dan Sagulung untuk langsung mendistribusikan hasil panennya ke pasar guna menekan inflasi lokal akibat permainan tengkulak. Dinamika pengawalan ratusan kelompok tani dengan berbagai tantangan agroklimat dan fluktuasi pasar inilah yang menuntut adanya rumusan strategi dinas yang adaptif.

Dalam kerangka ini, peran pemerintah seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota sangat relevan sebagai fasilitator, regulator dan pembina Kelompok Tani. Namun sejauh pengamatan literatur, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana dinas di tingkat kota kepulauan tersebut menjalankan strategi pemberdayaan Kelompok Tani dan bagaimana mekanisme tersebut berjalan daerah Kota Batam. Inilah yang menjadi kebaruan penelitian yang hendak diisi oleh kajian ini.

Dalam tinjauan literatur terdapat gap yang signifikan meskipun banyak penelitian telah memfokuskan pada pengukuran ketahanan pangan nasional atau analisis Kelompok Tani secara mandiri, sedikit yang mengaitkan secara empiris strategi dinas pemerintah daerah, pemberdayaan Kelompok Tani, dan indikator IKP secara terpadu dalam konteks lokal kota-kepulauan. Sebagai contoh, penelitian pemberdayaan Kelompok Tani banyak menggambarkan proses internal kelompok, namun tidak mengaitkannya dengan strategi dinas terkait dalam pemberdayaan demi meningkatkan produksi tanaman pangan luas atau kebijakan dinas pertanian. Dengan demikian, penelitian ini mencoba merespon kebutuhan untuk menggali secara kualitatif bagaimana institusi pemerintah daerah menjalankan strateginya dalam pemberdayaan Kelompok Tani, sehingga menawarkan kontribusi pada literatur dan kebijakan lokal.

Fokus penelitian ini diarahkan pada strategi apa saja yang akan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam lakukan untuk menjalankan peran pemberdayaan Kelompok Tani. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi program pemberdayaan. Urgensi penelitian ini adalah karena kota kepulauan seperti Batam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang diprediksi akan terancam melihat kebutuhan pangan yang akan meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk Kota Batam yang juga meningkat pesat ditahun 2025 sehingga pemahaman mendalam tentang interaksi antara dinas, Kelompok Tani dan pemberdayaan di tingkat lokal dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu

penguatan strategi ketahanan pangan di tingkat kota dan memperkaya literatur ketahanan pangan lokal dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

B. Rumuasan masalah

Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang kebijakan publik, pembangunan pertanian, dan ketahanan pangan daerah, khususnya terkait dengan strategi institusi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap konsep pemberdayaan masyarakat tani, terutama dalam konteks Kelompok Tani sebagai aktor penting dalam sistem ketahanan pangan lokal.
- c. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan berkelanjutan.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam mengevaluasi serta meningkatkan strategi pemberdayaan Kelompok Tani agar lebih efektif dalam mendukung peningkatan IKP.
- b. Temuan penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial,

ekonomi, dan geografis Kota Batam yang bercirikan wilayah kepulauan.

- c. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Kelompok Tani mengenai pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam kegiatan pertanian guna memperkuat kemandirian pangan lokal.

3. Dari sisi kebijakan publik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- b. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai guna yang nyata bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan praktik pembangunan pertanian daerah di Kota Batam dan wilayah sejenis lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses sistematis yang meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengendalikan sumber daya, membuat keputusan, serta mengambil tindakan kolektif demi perbaikan kesejahteraan dan kemandirian sosial-ekonomi. Konsep ini menekankan aspek kemampuan (*capability*), partisipasi, kontrol terhadap sumber daya, dan akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan⁵. Dalam literatur pembangunan lokal di Indonesia, model pemberdayaan diarahkan tidak sekadar pada distribusi bantuan, tetapi pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pengembangan modal sosial, dan pembentukan jaringan pasar yang berkelanjutan, sehingga intervensi menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Penekanan pada proses identifikasi kebutuhan, pelatihan partisipatif, pendampingan berkelanjutan membedakan pendekatan pemberdayaan modern dari paradigma bantuan tradisional⁶.

Dalam perspektif Pembangunan Sosial, konsep pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat menurut Ginandjar memiliki tiga pendekatan utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*⁷.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*)

Pilar *enabling* berfokus pada pembentukan lingkungan yang kondusif bagi optimalisasi potensi masyarakat. Pendekatan ini dilandasi

⁵ I Putu Gede Diatmika Sri Rahayu Penerbit: Ahlimedia Press. (2022). [Http://Www.Ahlimediapress.Web.Id/2022/09/Model-Pemberdaya](http://Www.Ahlimediapress.Web.Id/2022/09/Model-Pemberdaya)

¹⁵ *Ibid.*

⁷ Ginandjar Kartasasmita. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*

oleh keyakinan mendasar bahwa setiap individu maupun kelompok sosial pasti dibekali kemampuan yang dapat digali. Oleh karena itu, esensi dari pemberdayaan adalah proses membangkitkan kekuatan tersebut melalui stimulasi, peningkatan kesadaran dan motivasi terhadap potensi diri, kelompok ataupun lingkungan sekitar, peningkatan kesadaran masyarakat agar mereka mampu mengenali dan memajukan kapasitas mandiri, serta membangun lingkungan yang saling mendukung.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*Empowering*)

Pilar *empowering* bertujuan untuk menaikan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini tidak cukup hanya dengan membangun iklim yang kondusif (*enabling*), melainkan menuntut intervensi proaktif dan terukur dari pemerintah atau agen pemberdaya. Penguatan tersebut diwujudkan melalui tindakan konkret, yang mencakup pendistribusian sumber daya atau sarana pendukung (*input*), sekaligus memfasilitasi akses terhadap berbagai peluang strategis (*opportunities*) guna meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara nyata.

- c. Perlindungan (*Protecting*)

Esensi pemberdayaan juga mencakup pilar perlindungan (*protecting*), yang bermakna keberpihakan untuk mencegah kelompok rentan semakin terpinggirkan oleh dominasi pihak yang lebih kuat. Upaya perlindungan ini tidak diartikan sebagai tindakan isolasi yang justru akan menghambat perkembangan masyarakat marginal, melainkan sebagai langkah strategis untuk menekan risiko eksploitasi dan mencegah terjadinya kompetisi yang tidak berimbang. Lebih jauh, pemberdayaan sama sekali tidak dirancang untuk menumbuhkan mentalitas ketergantungan terhadap bantuan sosial (*charity*). Tujuan utama dari pilar ini adalah membentuk masyarakat untuk menikmati hasil dari jerih payahnya sendiri, serta membangun daya tahan agar mereka dapat memajukan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Dalam konteks sektor pertanian, pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis, akses teknologi tepat guna, akses pasar, dan penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai unit produksi dan negosiasi. Penelitian terkini di sejumlah desa menunjukkan bahwa program pemberdayaan kelompok tani yang difasilitasi oleh penyuluh atau dinas pertanian menghasilkan perbaikan praktik budidaya dan adopsi teknologi tepat guna, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tani⁸. Strategi yang terbukti efektif meliputi pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelatihan berbasis kebutuhan, serta upaya penghubungan kelompok dengan rantai pasok dan pasar lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan di sektor pertanian bukan hanya soal transfer teknologi tetapi juga penguatan kapasitas organisasi kelompok sehingga manfaat ekonomi dapat bertahan setelah intervensi formal berakhir⁹.

2. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan proses perencanaan komprehensif berjangka panjang yang dirancang agar membawa dampak positif bagi suatu organisasi. Pendekatan ini memadukan seni dan keilmuan dalam merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi sehingga tujuan utama dapat tercapai. Secara lebih mendalam, pendekatan ini berfungsi mengarahkan instansi melalui penyelarasan kapasitas manajerial, tanggung jawab, serta sistem administrasi yang menghubungkan keputusan operasional hingga strategis di seluruh hierarki. Meskipun sangat lekat dengan dunia bisnis dan ekonomi, konsep ini kini telah diadopsi secara luas oleh sektor publik. Instansi pemerintahan menerapkan manajemen

⁸ Sakung, J. M., Lukman, L., Rahman, Abd., & Dewi, N. U. (2024). *Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Simoro Dalam Mengatasi Kelebihan Produksi Labu Siam Melalui Pembuatan Pangan Fungsional Untuk Anak Stunting*. Jurnal Abdi Insani, 11(4), 1539–1547. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1885>

⁹ Fitri Adila Novianti, Irfan Nursetiawan, Muhammad Sobari, Riris Risnawati, & Ujang Irman Saputra. (2024). *Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya. Manfaat : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 52–59. <https://doi.org/10.62951/manfaat.v1i3.83>

strategis untuk mereplikasi efektivitas dan efisiensi dunia usaha, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang paling optimal.

Secara garis besar, manajemen strategis mencakup dua kegiatan yang saling berkesinambungan, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Prosesnya sendiri berjalan melalui tiga tahapan krusial, yaitu perumusan (*formulation*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*)¹⁰. Tahap perencanaan sangat bergantung pada hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun visi, misi, proyeksi, pedoman, beserta taktik pendukungnya.

Pada tahap pelaksanaannya, kesuksesan manajemen strategis dalam sebuah instansi termasuk organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lima faktor penentu¹¹.

- a. Tipe dan struktur organisasi: Pemilihan struktur organisasi berdampak pada kinerja, karena tipe organisasi menjelaskan pola interaksi, perilaku, dan kemandirian institusi, seperti halnya pemerintah daerah di era otonomi.
- b. Gaya kepemimpinan: Tipe kepemimpinan dan gaya manajerial seorang pimpinan (misalnya kepala daerah) akan sangat mempengaruhi format manajemen strategis yang akan dijalankan.
- c. Kompleksitas lingkungan eksternal: Tantangan organisasi pemerintahan daerah dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah menuntut pemimpin untuk menerapkan manajemen yang adaptif dan fleksibel dengan ditopang oleh fondasi yang kuat.
- d. Kompleksitas proses produksi/pelayanan: Dalam organisasi pemerintahan, kompleksitas jenis pelayanan menuntut pemerintah daerah menerapkan manajemen yang berkarakter organisasi pelayanan jasa secara optimal.

¹⁰ Cepi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023).

¹¹ *Ibid.*

- e. Hakikat permasalahan yang dihadapi: Manajemen puncak harus mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang kompleks secara matang hingga menyentuh akar penyebab (sebab), bukan hanya sekadar menangani dampaknya (akibat).

Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk implementasi strategi dalam manajemen strategis yang berfokus pada pemberian kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif¹². Hal inilah juga yang dialami pada pemberdayaan pada petani dalam konteks peningkatan hasil panen mereka. Menurut Sukino dalam bukunya berjudul *Membangun pertanian dengan pemberdayaan masyarakat tani: Terobosan menanggulangi kemiskinan*¹³, salah satu cara pemberdayaan masyarakat tani yang paling strategis adalah melalui kelompok tani¹⁴.

3. Kelompok Tani

Kelompok tani dalam literatur pembangunan pertanian Indonesia dipahami sebagai organisasi sosial di tingkat lokal yang berfungsi sebagai wahana belajar, wadah kerja sama, dan unit produksi bagi petani. Kelompok tani dibentuk untuk memperkuat posisi tawar petani dalam memperoleh informasi, teknologi, akses modal, serta hubungan dengan pasar. Struktur kelembagaan ini dipercaya menjadi pilar penting dalam modernisasi pertanian karena memungkinkan petani melakukan proses pembelajaran kolektif, saling bertukar pengalaman, dan mengorganisasi kegiatan budidaya secara sistematis¹⁵. Buku-buku pembangunan masyarakat menjelaskan bahwa kelembagaan lokal seperti kelompok tani

¹² Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 8(2), 1–12.

¹³ Sukino. (2013). *Membangun pertanian dengan pemberdayaan masyarakat tani: Terobosan menanggulangi kemiskinan*. Pustaka Baru Press.

¹⁴ Ratnawati, Mappamiring, & Ansyari Mone. *Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 3, Desember 2017, hlm. 342–358. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹⁵ I Putu Gede Diatmika Sri Rahayu, *op. cit.*, hal. 16

berperan dalam membangun modal sosial, meningkatkan solidaritas, dan memperkuat kemampuan masyarakat mengendalikan sumber daya produktifnya.

Penelitian terapan di Indonesia menunjukkan bahwa Kelompok Tani yang berjalan efektif dapat mempercepat adopsi teknologi tepat guna, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta memperbaiki kapasitas petani dalam pengelolaan produksi¹⁶. Kelompok Tani juga menjadi saluran utama bagi pemerintah dan dinas terkait dalam penyaluran program mulai dari penyuluhan, pendampingan teknis, bantuan sarana produksi, hingga akses pemasaran. Studi kasus pemberdayaan di level desa memperlihatkan bahwa kelompok yang memiliki struktur organisasi jelas, kepemimpinan kuat, dan mekanisme rapat rutin lebih mampu memanfaatkan peluang program dan menjaga keberlanjutan kegiatan¹⁷. Dengan demikian, Kelompok Tani tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi juga motor penggerak pembangunan pertanian berbasis komunitas.

Dalam konteks ketahanan pangan, Kelompok Tani memegang posisi strategis karena berperan langsung dalam peningkatan ketersediaan pangan, diversifikasi komoditas, dan stabilitas produksi pertanian rumah tangga. Kelompok yang aktif dan produktif memungkinkan penyebaran informasi terkait inovasi budidaya, pengolahan pascapanen, serta pengelolaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim¹⁸. Oleh karena itu, Kelompok Tani dapat dipahami sebagai pilar kelembagaan yang tidak hanya memperkuat produksi pertanian, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam pencapaian ketahanan pangan daerah.

¹⁶ Fitri Adila Novianti, *op. cit.*, hal. 16

¹⁷ Sakung, *op. cit.*, hal. 17

¹⁸ Riwanda Sinaga, Tri Endar Suswatiningsih, Istiti Purwandari (2024). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kalurahan Semoyo Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul*

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan	Referensi
1.	Nippi, A. T. (2019)	Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Siawung sudah menjalankan strategi dengan cukup baik, meskipun belum maksimal sebagaimana mestinya	Pemerintah Desa Siawung telah menjalankan strategi yang cukup baik untuk memberdayakan kelompok tani, sehingga telah dirasakan manfaatnya oleh petani, tetapi secara substansial strategi tersebut belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan pengembangan kelompok tani sehingga pelaksanaannya belum maksimal sebagaimana mestinya.	https://media.neliti.com/media/publications/284691-strategi-pemerintah-desa-dalam-pemberday-22d6bf41.pdf
2.	Astiti et al. (2021)	Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Urban Farming Kelompok Tani Tandur Tukul di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)	Pemberdayaan Kelompok Tani Tandur Tukul didukung oleh ketua dan anggota kelompok tani, tokoh masyarakat, organisasi SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Kelurahan Joyosuran, Pemerintah Kelurahan Joyosuran, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan-KPP) Kota Surakarta, dan LPMK Joyosuran dalam bentuk materi dan non materi.	Meskipun pemberdayaan Kelompok Tani Tandur Tukul untuk program <i>urban farming</i> telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, keberhasilannya masih terhambat oleh kurangnya wawasan budidaya dan komunikasi yang belum efektif, sehingga memerlukan solusi berupa studi banding dan penguatan kapasitas kelembagaan.	https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep
3.	Erlina et al. (2022)	Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tunas Mekar Jaya Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar telah memberdayakan Kelompok Tani melalui sosialisasi, pelatihan teknis pengolahan lahan, dan evaluasi berkelanjutan sesuai visi serta arahan pemerintah pusat.	Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar dalam memberdayakan Kelompok Tani Tunas Mekar Jaya sudah berjalan melalui program pendidikan dan pelatihan, namun hasilnya belum optimal akibat terkendala rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan belum meratanya distribusi bantuan.	http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2349

Peneliti pertama yaitu Andi Tenri Nippi dan Andi Pananrangi M. Dengan tulisan berjudul Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Siawung telah menjalankan strategi yang cukup baik untuk memberdayakan kelompok tani, sehingga telah dirasakan manfaatnya oleh petani, tetapi secara substansial strategi tersebut belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan pengembangan kelompok tani sehingga pelaksanaannya belum maksimal sebagaimana mestinya.¹⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pelaku pemberdayaan, dipenelitian ini pelakunya adalah Pemerintah Desa Siawung, sedangkan penelitin yang akan dilakukan pelaku pemberdayaannya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Penelitian kedua disusun oleh Ida Ayu Putri Astiti, Joko Winarno, dan Eksa Rusdiyana yang menganalisis dukungan serta kendala dalam pemberdayaan Kelompok Tani urban *Tandur Tukul* dalam meningkatkan ketahanan pangan di Surakarta. Penelitian ini mengungkap bahwa pemberdayaan didukung oleh berbagai instansi, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, meski masih terhambat oleh faktor komunikasi dan wawasan budidaya anggota. Persamaan kajian ini dengan usulan skripsi sangat erat, yaitu sama-sama mengaitkan peran Dinas Ketahanan Pangan terhadap upaya pemberdayaan Kelompok Tani dalam lanskap pertanian perkotaan²⁰. Namun, perbedaan titik fokusnya adalah penelitian terdahulu lebih mengedepankan identifikasi ragam bentuk dukungan sosial dan hambatan dari berbagai elemen tokoh masyarakat, sementara usulan skripsi ini akan secara holistik menganalisis rumusan "Strategi" pemberdayaan dari dinas tersebut.

¹⁹ Nippi, A. T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja journal*, 2(1), 284691.

²⁰ Ida Ayu Putri Astiti, Joko Winarno, Eksa Rusdiyana (2021). *Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Urban Farming Kelompok Tani Tandur Tukul di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)*.

Penelitian ketiga dari Erlina, Endah Vestikowati, dan Ii Sujai meneliti secara spesifik peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Tunas Mekar Jaya di Kota Banjar. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran dinas sudah berjalan dalam wujud sosialisasi, pemberian program percontohan, hingga evaluasi bagi kelompok tani. Kesamaan dengan rencana penelitian sangat kental, karena sama-sama menetapkan Dinas Ketahanan Pangan sebagai lokus penelitian utama untuk memotret kinerjanya dalam memberdayakan para petani²¹. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan kerangka teori "Peran Pemerintah" (sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dsb.) yang diterapkan pada satu Kelompok Tani spesifik. Sebaliknya, usulan penelitian yang akan diangkat menggunakan dimensi kerangka ukur "Strategi pemberdayaan" serta memperluas segmentasi sasarannya agar lebih komprehensif, yakni mencakup pembinaan Kelompok Tani di kawasan Kota Batam.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara ketiga penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan diajukan terletak pada fokus aktor utama, cakupan sasaran, dan pendekatan konseptual yang diangkat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis dinamika internal serta dampak pemberdayaan dari sudut pandang kelompok itu sendiri, menitikberatkan pada tindakan pengabdian masyarakat secara partisipatif, atau hanya memetakan bentuk dukungan dan peran dasar pemerintah pada satu kelompok spesifik. Sebaliknya, penelitian yang akan Anda susun secara komprehensif memposisikan instansi pemerintah sebagai aktor sentral dengan mengkaji secara mendalam "strategi pemberdayaan" kebijakannya, bukan sekadar mengevaluasi "perannya".

²¹ Erlina, Vestikowati, E., & Sujai, I. (n.d.). *Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tunas Mekar Jaya Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar*. Halaman 3083-3094.

C. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, definisi konseptual digunakan untuk memberikan batasan makna terhadap setiap variabel yang diteliti agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

1. Ketahanan pangan memiliki arti sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan individu atau kelompok secara cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan, yang ditunjukkan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu tujuan dari pemberdayaan Kelompok tani di Kota Batam.
2. Manajemen strategi memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan lintas fungsional yang dirancang agar suatu organisasi atau instansi dapat mencapai tujuan-tujuannya. Konsep ini bertindak sebagai sebuah rencana untuk menuntun organisasi pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, penguatan kapabilitas manajerial, serta pemenuhan tanggung jawab institusional.
3. Pemberdayaan masyarakat memiliki arti sebagai proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya serta mengambil keputusan secara mandiri. Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu penciptaan kondisi yang mendukung berkembangnya potensi (enabling), penguatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya (empowering), serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar tidak mengalami ketimpangan (protecting).
4. Kelompok Tani didefinisikan sebagai kelembagaan sosial di tingkat lokal yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan unit produksi bagi petani dalam meningkatkan kapasitas usaha tani. Dalam penelitian ini, Kelompok Tani dipahami sebagai aktor kolektif yang berperan dalam meningkatkan produksi pertanian, memperkuat akses terhadap teknologi dan pasar, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya pertanian secara bersama.

D. Definisi Oprasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel-variabel yang akan diukur, sehingga memudahkan proses pengumpulan data dan analisis di lapangan. Dengan menggunakan teori utama Pemberdayaan Masyarakat dari buku Ginandjar Kartasasmita. Teori Pemberdayaan Masyarakat dari Ginandjar Kartasasmita (1995) sangat layak digunakan sebagai pisau analisis utama karena menawarkan kerangka kerja yang utuh dan terstruktur untuk membedah keseluruhan strategi pemberdayaan Dalam konteks institusi sektor publik seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Lebih jauh lagi, orientasi teori ini pada pencapaian tujuan jangka panjang dan keberlanjutan sangat selaras dengan konteks proyeksi penelitian ini di tahun 2025, sehingga memungkinkan untuk menilai apakah strategi pemberdayaan Kelompok Tani tersebut bersifat proaktif dalam membangun ketahanan pangan Batam secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Dimensi	Konsep Oprasional	Indikator
Enabling	Upaya untuk menciptakan suasana, iklim, atau lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.	1. Intensitas Komunikasi dan Pendampingan 2. Akses Informasi
Empowering	Upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.	1. Jumlah Distribusi Bantuan Sarana Produksi 2. Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pelatihan
Protecting	Upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi oleh pihak yang kuat.	1. Program Perlindungan Harga Jual hasil produksi 2. Program Perlindungan Lahan

E. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam pemberdayaan Kelompok Tani. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta dinamika implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti sebagaimana adanya di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menguraikan bentuk strategi yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, mekanisme pemberdayaan Kelompok Tani, serta keterkaitannya dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kebijakan dan pemberdayaan yang berlangsung di tingkat lokal.

Penelitian ini juga bersifat studi kasus, dengan fokus pada Kota Batam sebagai lokasi penelitian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam suatu fenomena dalam konteks yang spesifik dan nyata. Kota Batam memiliki karakteristik wilayah perkotaan dan kepulauan yang menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadikannya relevan sebagai kasus penelitian. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat memahami secara kontekstual bagaimana kebijakan ketahanan pangan diimplementasikan dan bagaimana strategi dinas dijalankan di wilayah tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis

data. Peneliti berinteraksi dengan informan, mengamati aktivitas pemberdayaan, serta menelaah dokumen kebijakan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif aktor-aktor yang terlibat, termasuk aparaturnya dinas, pengurus Kelompok Tani, dan pihak terkait lainnya.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam pemberdayaan Kelompok Tani. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan kebijakan ketahanan pangan daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam dipilih sebagai lokasi penelitian karena cocok dengan masalah utama yaitu jumlah masyarakatnya setiap tahun terus meningkat namun jumlah lahan tanam di kota ini terus berkurang. Penelitian ini dilaksanakan pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, serta pada salah satu Kelompok Tani yang berada di wilayah Kota Batam. Penentuan Kelompok Tani sebagai lokasi observasi dan wawancara dilakukan secara bertahap selama proses penelitian, disesuaikan dengan aksesibilitas dan relevansi terhadap fokus penelitian. Waktu penelitian dilakukan mulai awal tahun 2026, dan diharapkan selesai secepatnya.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpercaya mengenai objek kajian, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini berwujud transkrip hasil wawancara mendalam terkait strategi, kendala, dan persepsi keberhasilan program pemberdayaan, serta catatan lapangan (*field notes*) yang merekam

hasil observasi langsung terhadap aktivitas aparatur dinas dan dinamika kegiatan operasional Kelompok Tani di Kota Batam.

Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai informasi pelengkap dan pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, laporan akuntabilitas kinerja instansi, hingga publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Selain itu, literatur akademik seperti buku, jurnal penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan terkait ketahanan pangan juga digunakan sebagai landasan argumentasi dan alat bantu untuk menganalisis temuan lapangan.

D. Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat menunjuk langsung pihak-pihak yang dinilai paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, khususnya pada bidang atau seksi yang secara struktural bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat pertanian. Pemilihan aparatur dinas ini didasarkan pada kapasitas mereka sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengevaluasi program-program strategis pemerintah daerah di lapangan.

Dalam penelitian ini, penentuan informan ini dilakukan juga dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (sampel bola salju). Teknik ini merupakan metode penarikan sampel non-probabilitas di mana peneliti mengumpulkan data dari satu atau beberapa informan kunci awal, yang kemudian diminta untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki

pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian.

Secara konseptual, proses pencarian informan melalui teknik ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding berawal dari jumlah sampel yang kecil dan perlahan membesar seiring dengan bertambahnya rujukan dari jaringan yang saling terkait. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seringkali daftar pasti dari seluruh populasi tidak diketahui secara spesifik, sehingga peneliti memerlukan rujukan silang untuk menjangkau individu-individu yang relevan dengan fenomena yang diamati.

Sebagai langkah pelaksanaan, pengumpulan data dimulai dengan menemui informan awal yang dinilai memiliki pemahaman komprehensif atau kedudukan strategis, misalnya aparatur pemerintah, penyuluh lapangan, atau ketua kelompok tani. Setelah wawancara mendalam dilakukan, peneliti akan meminta informan tersebut untuk menunjuk atau merekomendasikan informan selanjutnya yang berpartisipasi atau merasakan langsung dampak dari strategi pemberdayaan yang sedang diteliti.

Selain unsur pemerintah, penelitian ini juga melibatkan informan utama dari kalangan masyarakat, yaitu para pengurus dan anggota aktif Kelompok Tani di teliti yang terdaftar di Kota Batam. Penunjukan informan dari elemen masyarakat ini sangat krusial untuk melakukan triangulasi informasi, sehingga peneliti tidak hanya mendapatkan perspektif regulator, tetapi juga pandangan langsung dari pihak yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, melainkan bersifat fleksibel dan akan terus berkembang di lapangan hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yakni ketika wawancara tidak lagi menghasilkan temuan atau informasi baru yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Tabel 3.1 Tabel Informan

Informan	Jumlah
Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan Kota Batam	1
Staf Bidang Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan Kota Batam	1
Penyuluh Pertanian	1
Ketua Kelompok Tani	1
Anggota Kelompok Tani	3

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam upaya menggali data kualitatif yang kaya dan bermakna, penelitian ini bersandar pada tiga teknik pengumpulan data utama yang dilakukan secara terintegrasi, yakni wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Melalui interaksi tatap muka yang dialogis dan terbuka ini, peneliti akan menggali informasi terperinci mengenai tahapan manajemen strategi dinas, mulai dari pemindaian lingkungan hingga evaluasi, serta mendengarkan langsung narasi pengalaman Kelompok Tani selama menerima program pembinaan dari pemerintah kota.

Sebagai instrumen verifikasi atas informasi verbal yang diberikan oleh informan, peneliti juga melakukan observasi secara non-partisipan. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi faktual infrastruktur pertanian, proses distribusi bantuan sarana prasarana, jalannya kegiatan penyuluhan, hingga praktik nyata pemanfaatan lahan pekarangan dan aktivitas budidaya oleh Kelompok Tani reguler. Observasi ini bertujuan untuk memotret sinkronisasi antara klaim keberhasilan program yang disampaikan saat wawancara dengan realitas fisik dan sosial yang terjadi di lokasi pemberdayaan.

Guna memperkuat validitas data dari wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data ditutup dengan pelaksanaan studi dokumentasi. Peneliti akan menghimpun dan menganalisis berbagai rekam jejak tertulis maupun visual yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi Surat Keputusan (SK) pembentukan kelompok, laporan realisasi program pemberdayaan dari dinas, notulensi rapat koordinasi, hingga dokumentasi foto kegiatan penyuluhan dan penyerahan bantuan di lapangan. Keseluruhan dokumen ini akan diurai dan dirangkai untuk merekonstruksi jejak-jejak administratif dari pelaksanaan strategi pemerintah daerah yang diteliti.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif interaktif, yang dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis data dilakukan untuk memahami secara mendalam strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam pemberdayaan Kelompok Tani. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dianalisis dengan menekankan pada makna, proses, serta hubungan antar fenomena yang muncul di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Batam.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi dinas dan bentuk pemberdayaan Kelompok Tani. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar konsep. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap

dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi.

BAB IV

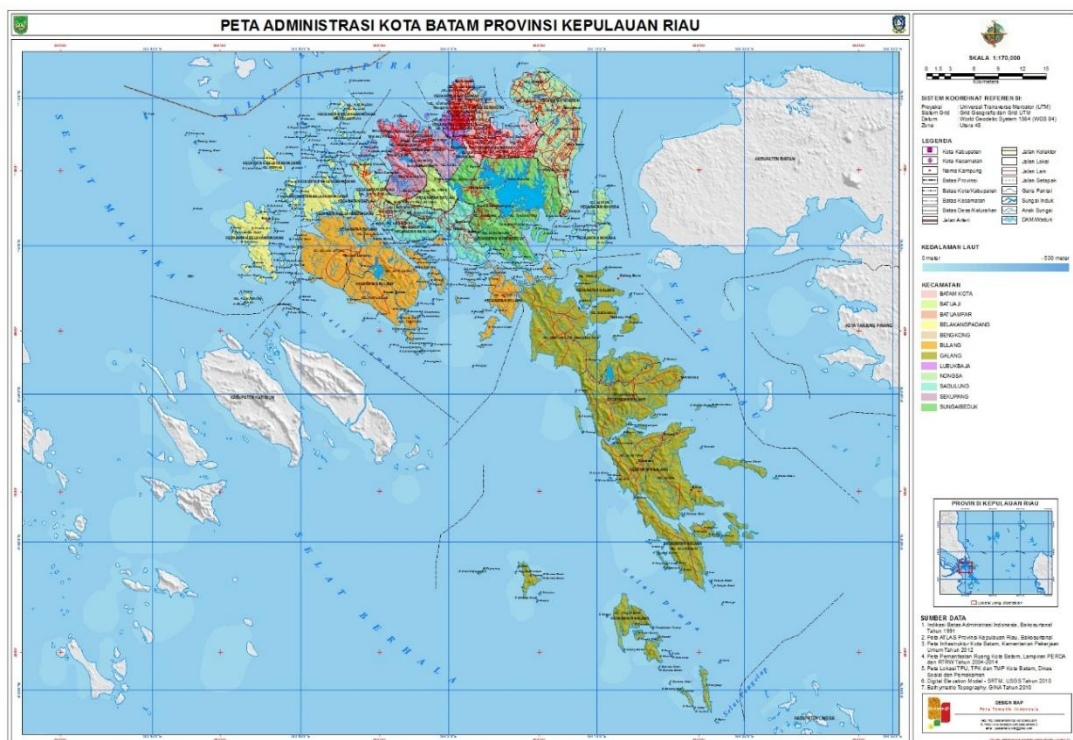
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1. Kota Batam

Kota Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis karena berada tepat di jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data terkini dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, total keseluruhan luas wilayah kota ini mencapai 3.848,97 kilometer persegi, yang didominasi oleh bentangan perairan laut sebesar 73 persen. Sementara itu, luas wilayah daratan yang bisa dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai aktivitas manusia hanya mencakup sekitar 27 persen atau seluas 1.038,84 kilometer persegi saja.

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Batam Kepulauan Riau



Sumber: <https://peta-kota.blogspot.com/2011/05/peta-kota-batam.html>

Kondisi topografi daratan di Kota Batam umumnya didominasi oleh dataran berbukit, berlembah, serta struktur tanah merah atau bauksit yang sejak awal dikenal kurang subur untuk kegiatan budidaya pertanian intensif. Keterbatasan tingkat kesuburan tanah ini semakin diperparah dengan kondisi iklim dan cuaca kepulauan yang kerap berubah-ubah, sehingga area pertanian di kota ini umumnya hanya dapat ditanami jenis komoditas tertentu yang mampu bertahan tanpa bergantung penuh pada ritme musim. Oleh karena itu, ketersediaan lahan yang benar-benar produktif sangatlah minim dan justru terus-menerus tergerus oleh urgensi ekspansi kawasan industri, pembangunan permukiman, serta infrastruktur jasa yang menjadi urat nadi utama perekonomian daerah tersebut.

Untuk memperjelas gambaran fisik kewilayahan tersebut, berikut adalah tabel proporsi tata guna dan karakteristik lahan di Kota Batam:

Tabel 4.1. Karakteristik Geografis dan Luas Wilayah Kota Batam

No.	Indikator Geografis	Luas / Persentase	Keterangan Wilayah
1	Total Luas Wilayah	3.848,97 km ²	Akumulasi luas wilayah daratan dan perairan laut.
2	Luas Wilayah Lautan	± 2.810,13 km ²	Mencakup 73% dari total luas wilayah Kota Batam.
3	Luas Wilayah Daratan	1.038,84 km ²	Mencakup 27% dari total luas wilayah Kota Batam.
4	Karakteristik Tanah	Tanah Merah (Bauksit)	Struktur tanah yang kurang subur untuk budidaya pertanian masal.

Sumber: Buku Profil Kota Batam edisi 21

Akibat minimnya lahan pertanian yang produktif serta masifnya konversi lahan menjadi kawasan terbangun komersial, Kota Batam hingga saat ini terbukti belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri melalui produksi dari petani lokal. Untuk menyiasati tingginya defisit produksi domestik tersebut, pemerintah daerah bersama para pelaku usaha terpaksa sangat mengandalkan pasokan bahan pokok maupun komoditas hortikultura yang diimpor dari provinsi lain (luar daerah) hingga dari negara tetangga. Pola ketergantungan absolut pada jalur pasokan eksternal ini pada akhirnya menciptakan kerentanan ketahanan pangan tersendiri, terutama saat wilayah ini dihadapkan pada fluktuasi harga pasar nasional, gangguan cuaca ekstrem di perairan, serta berbagai hambatan logistik dalam rantai distribusi pelayaran antarpulau.

Berdasarkan realitas kondisi kelangkaan lahan produktif tersebut, kajian lanjutan mengenai perwujudan ketahanan pangan di Kota Batam menjadi sebuah urgensi akademik yang menuntut untuk segera dipecahkan. Evaluasi mendalam terhadap strategi kebijakan institusi lokal amat diperlukan guna menelaah sejauh mana intervensi yang dijalankan mampu menambal celah kerawanan suplai bahan pokok di tengah keterbatasan sumber daya agraria yang ada. Oleh sebab itu, peneliti sangat merekomendasikan adanya sebuah sub bab baru yang dirancang khusus untuk membedah instrumen adaptasi masyarakat dalam merespons defisit pangan struktural di wilayah kepulauan ini.

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam dibentuk sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintah Kota Batam yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan. Pembentukan dinas ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Batam dalam menghadapi tantangan penyediaan dan pengelolaan pangan di wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi dan demografi.

Kota Batam, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, mengalami laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem ketahanan pangan yang tangguh, meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, serta kecukupan gizi masyarakat. Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan jaminan ketersediaan pangan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan, Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum berdirinya dinas ini, yang diresmikan oleh Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, S.E., M.M. Peresmian ini menandai komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mengelola sektor pangan secara profesional, terencana, dan terintegrasi.

Sebelum berdirinya dinas ini secara mandiri, urusan pangan di Kota Batam masih menjadi bagian dari tugas Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas persoalan pangan dan pentingnya sinergi lintas sektor, pemerintah daerah memandang perlu membentuk lembaga tersendiri yang berfokus pada penguatan sistem ketahanan pangan daerah.

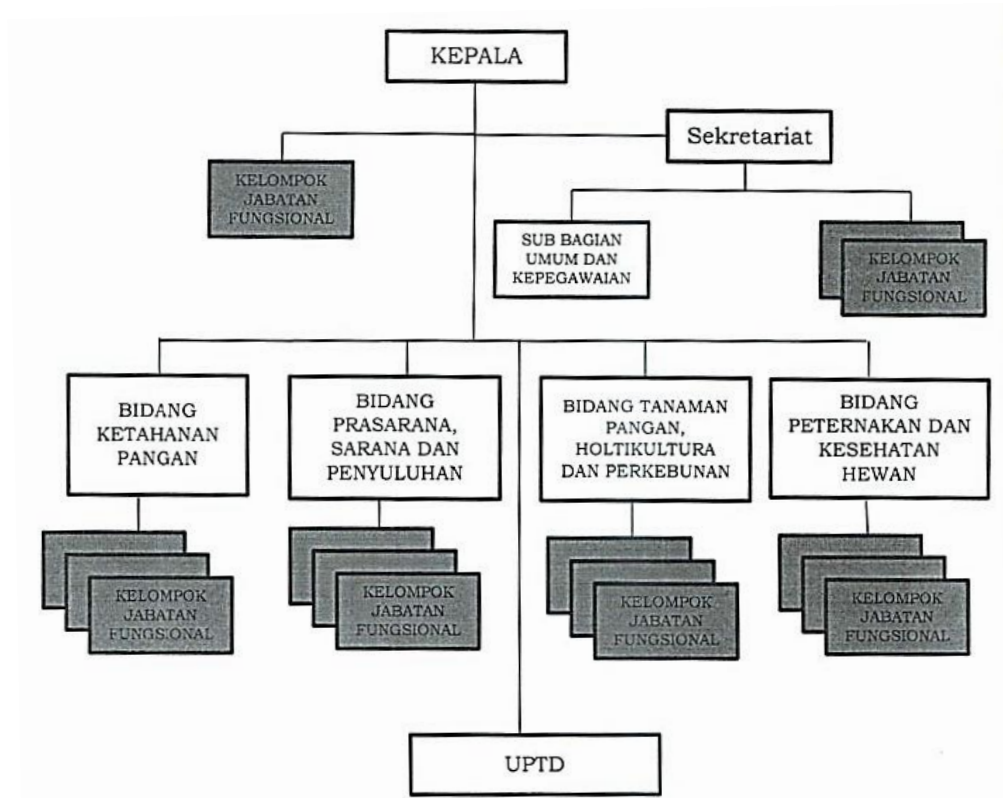
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam (yang juga dikenal dengan sebutan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam) berperan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerah. Dinas ini berkoordinasi dengan berbagai instansi, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional, serta melibatkan pelaku usaha pangan, petani, nelayan, dan masyarakat secara luas.

Melalui berbagai program dan kegiatan seperti pengembangan cadangan pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, pemantauan

harga dan distribusi pangan, serta edukasi gizi masyarakat, dinas ini berupaya mewujudkan sistem ketahanan pangan yang kuat, berdaulat, dan berkelanjutan di Kota Batam.

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam



Sumber: Peraturan Walikota Batam No.33 Tahun 2024

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan terkoordinasi. Pada tingkat pimpinan terdapat Kepala Dinas, yang bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai visi, misi, dan peraturan yang berlaku. Di bawah Kepala Dinas terdapat Sekretariat yang berperan dalam mendukung aspek administrasi, tata usaha, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas

menangani urusan administrasi internal, termasuk pengelolaan pegawai, sarana prasarana kantor, dan tata laksana umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berkontribusi melalui keahlian teknis sesuai kompetensi masing-masing.

Unit teknis dalam dinas terdiri dari beberapa bidang yang menangani urusan spesifik sesuai kebutuhan pelayanan publik di sektor ketahanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan bertugas merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kebijakan terkait ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan di daerah. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tani untuk mendukung peningkatan produksi dan keberlanjutan program. Selanjutnya, terdapat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang menangani pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan budidaya tanaman pangan, komoditas hortikultura, serta perkebunan di wilayah kerja. Selain itu, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam pengembangan sektor peternakan serta pengawasan kesehatan hewan guna memastikan keamanan pangan asal hewan dan mencegah penyakit hewan menular.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat operasional, dinas juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi menjalankan layanan teknis di lapangan sesuai bidang tugasnya. Selain unit struktural, terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai kompetensi spesifik, seperti penyuluh pertanian, analis ketahanan pangan, dan tenaga teknis lainnya, yang mendukung pencapaian tujuan dinas melalui penerapan keahlian profesional. Dengan susunan organisasi yang terstruktur dan jelas ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, pangan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 4.2. Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Batam**

No.	Nama / NIP - NIPPPK	Jabatan	Pangkat/Go I/TMT
1	MARDANIS, AMP, SE, MH NIP. 19680714 198811 1 003	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)
SEKRETARIAT			
2	FIRMANSYAH FATTAH, SE, M.Si NIP. 19681102 199603 1 003	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)
3	NURYANI, SE NIP. 19710812 199203 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)
4	ERNI ERAWATI, SP, MM NIP. 19810808 200312 2 010	Analisis Keuangan Pusat/Daerah	Pembina (IV/a)
5	GUNAR DIAN PUTRI ISWANTI, S.Pt NIP. 19850917 201101 2 004	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penata Tk. I (III/d)
6	FEBRINA ELSA PUTRI, S.TP NIP. 19840209 201101 2 004	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Penata (III/c)
7	RIKA ANDRIYANI, SE NIP. 19720815 200701 2 013	Penata Laporan Keuangan	Penata (III/c)
8	RITA AMELIA, A.Md NIP. 19820125 200604 2 002	Bendahara Pengeluaran	Penata (III/c)
9	YUSRIL NIP. 19690819 200212 1 006	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda Tk. I (III/b)
10	ARIF MUBADAR SARI, A.Md NIP. 19890426 202203 2 005	Arsiparis Terampil	Penata (III/c)
11	AYU PANGESTI, A.Md NIPPPK 19991213 202312 2041	Arsiparis Terampil	VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS			
12	LENY HERMAYANTI, S.P, MM NIP. 19701122 200112 2 005	Kepala UPT RPH/RPU	Pembina (IV/a)
13	SUGIYAT, SP NIP. 19710403 200212 2 002	Kepala Subbag TU UPT RPH/RPU	Penata Tk. I (III/d)

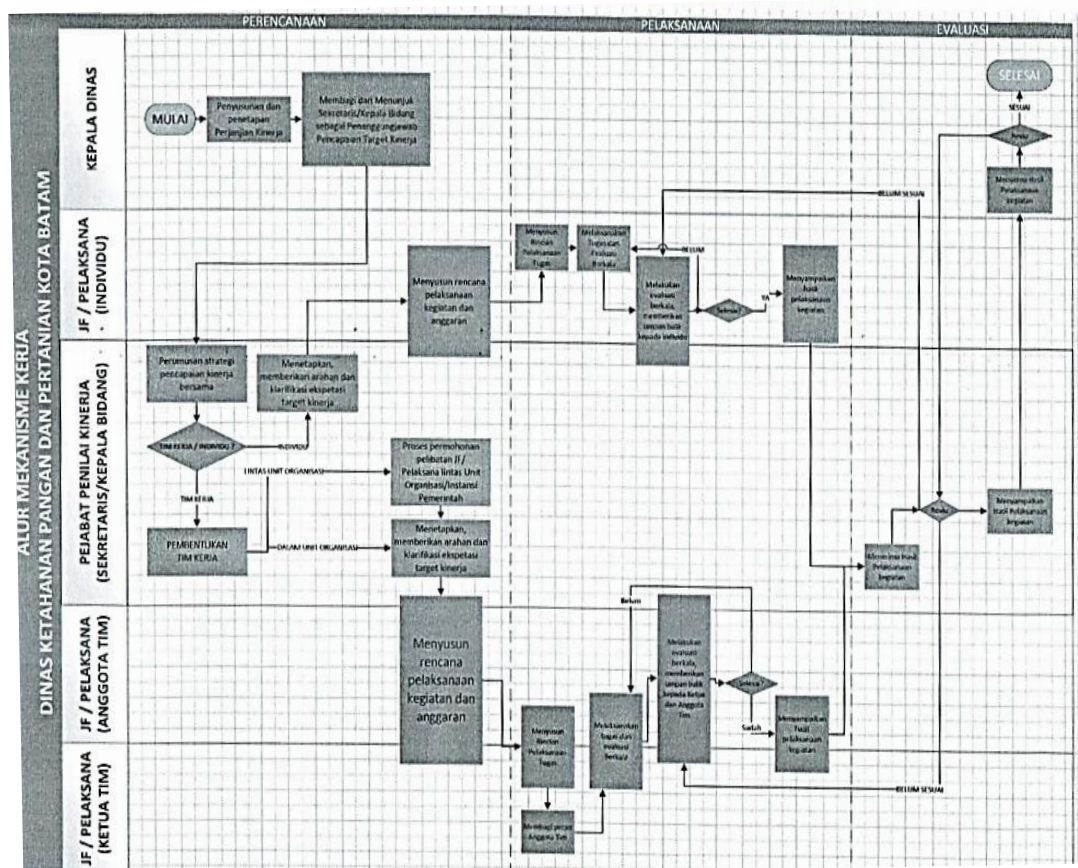
14	drh. RISFI FEBRINA TRI UTAMI EMHA NIPPPK. 19940210 202312 2045	Medik Veteriner Ahli Pertama	X
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN			
15	drh. JUSAK WIRA HARDJA, M.Si NIP. 19701226 200312 1 003	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	Pembina (IV/a)
16	KOPERTINI PALAYUK TALLULEMBANG, S.F NIP. 19720918 200604 2 017	Kepala Subbag TU UPT Pusat Kesehatan Hewan	Penata Tk. I (III/d)
17	drh. NURMIATSARI RAHMADHANI NIP. 19970110 202203 2 005	Medik Veteriner Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)
BIDANG KETAHANAN PANGAN			
18	SRI SUMARWINATI, SP, MM NIP. 19770718 200212 2 005	Kabid Ketahanan Pangan	Pembina (IV/a)
19	DINA MARIA HANDAYANI, S.TP, MM NIP. 19780318 201001 2 007	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
20	NELY MAHDIANA, S.Pi, M.Si NIP. 19760515 201101 2 001	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
21	SAID THALIB, S.Sos NIP. 19691202 200212 1 006	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
22	MUHARDI NIP. 19720303 201001 1 004	Pengelola Ketahanan Pangan	Pengatur (II/c)
BIDANG KELEMBAGGAN DAN PENYULUHAN			
23	TETTY SANDRA MILA, SKM NIP. 19701027 199203 2 002	Kabid Ketahanan Pangan	Pembina (IV/a)
24	AGUNG PERMANA, A.Md NIP. 19740328 199703 1 004	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
25	EKO PUJIYONO, SP NIP. 19700101 199303 1 027	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
26	Ir. H. KIAGUS ROZALI, MH NIP. 19621204 199603 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pembina (IV/a)
27	WAHYU PURWADESSY DALGA, A.Md NIP. 19831202 201001 2 016	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penata Muda Tk. I (III/b)

28	SITI NURBAYA NIP. 19770706 200604 2 047	Pengelola Program Penyuluhan	Penata Muda (III/a)
29	RIKY HIDSON NIP. 19940902 202012 1 005	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	Pengatur Muda (II/a)
30	SL. PARLINDUNGAN SIRAIT, SP NIPPPK. 19710611 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	IX
31	KURNIAWAN GINTING NIPPPK. 19741205 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	V
32	MARLENI NIPPPK. 19770228 202121 2 003	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	V
33	RASDAWATI NIPPPK. 19801114 202121 2 006	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	V
BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KOTA BATAM			
34	Meili Suryanti, SP, MM NIP. 19790507 200502 2 007	Kepala Bidang TPHP Kota Batam	Pembina (IV/a)
35	Devi Januardi Sartely, SP NIP. 19790710 201101 1 001	Analisis Pasar Hasil Pertanian-Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
36	Desma Efendi, A.Md NIP. 19771219 200701 1 009	Analisis Informasi Publik Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Penata (III/c)
37	Anggun Aprillia Wardhanie, S.Sos. NIP. 199504232024052009	Fasilitator Pemerintahan	III/a
38	Rionardi Z, S.P. NIPPPK. 197812292023211003	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	IX
39	Fadilah Deiner, S.TP NIPPPK. 198604102023212041	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	IX
40	Jefri Chardo Sihombing, S.P. NIPPPK. 198806182023211019	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	IX
41	Rio Bima Handika, S.P. NIPPPK. 199312282023211015	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	IX

BIDANG PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
42	Dwi Hargadi Kunto Sisworo, SP, MM NIP. 19751213 200502 1 004	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembina (IV/a)
43	Drh. Samuel Tampubolon NIP. 19750603 200604 1 013	Medik Veteriner - Ahli Muda	Pembina (IV/a)
44	Rini Kosari, S.Si NIP. 19730301 200502 2 007	Pengawas Mutu Hasil Pertanian-Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)
45	Dahman Nasution, SE NIP. 19610411 199303 1 006	Analisis Kebijakan Masyarakat Veteriner	Penata (III/c)
46	Nelmi Fitrayenti, S.Pt NIP. 19780319 201406 2 003	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	Penata (III/c)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 2025

Gambar 4.3. Mekanisme Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam



Sumber: Peraturan Walikota Batam No.33 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 33 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan sistem kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dijelaskan bahwa mekanisme kerja pasca dilakukannya penyederhanaan struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- 1) Perencanaan, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penentuan pembagian tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Administrator.
 - b) Kepala Dinas memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama.
 - c) Atas arahan tersebut Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya.
 - d) Arahan dan ekspektasi target kinerja disampaikan Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana dibawah koordinasinya.
 - e) Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi lain akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit Organisasi.
 - f) Penyelesaian target kinerja dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu ataupun Tim Kerja sesuai arahan dan target kinerja Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian.
 - g) Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian menentukan perlu atau tidaknya penunjukan Ketua Tim untuk kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja.
 - h) Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun Tim Kerja bersama Sekretaris/Kepala Bidang/ dan/atau

Kepala Sub Bagian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

2) Pelaksanaan

- a) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
- b) Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- c) Pejabat Fungsional atau Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait namun tidak terbatas pada sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan.
- d) Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Ketua Tim.
- e) Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau Ketua Tim.

3) Evaluasi

- a) Sekretaris/Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan.
- b) Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditinjau.
- c) Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Kepala Dinas menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.²²

²² Peraturan Walikota Batam No. 33 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan sistem kerja dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam.

b. Visi, Misi dan Tupoksi

Visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam mencerminkan arah pembangunan pangan daerah yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh dinas tersebut tidak hanya disusun secara terencana dan terpadu, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam berupaya memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan merata. Selain itu, arah kebijakan ini juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1) Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam.

Visi dinas ini adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Mandiri, Aman, Berkualitas, dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Kota Batam.” Visi tersebut menggambarkan cita-cita besar pemerintah daerah untuk membangun suatu sistem pangan yang tangguh, menyeluruh, dan berdaya saing tinggi, tidak hanya dalam aspek ketersediaan bahan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga dalam memastikan bahwa pangan yang tersedia terjamin keamanannya, memiliki mutu yang baik, serta dapat dikelola secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Melalui visi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam menegaskan komitmennya untuk menciptakan kondisi ketahanan pangan yang stabil dan inklusif sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, visi tersebut juga mencerminkan peran strategis dinas dalam memperkuat fondasi

pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya pangan secara optimal, sehingga mampu mendukung terciptanya kemandirian pangan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

2) Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam.

Untuk mencapai visi tersebut, dinas ini menetapkan sejumlah misi yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan. Pertama, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, mendorong kemandirian pangan melalui pengembangan potensi sumber daya lokal seperti pertanian perkotaan, perikanan, dan peternakan rakyat. Ketiga, menjamin mutu serta keamanan pangan melalui pengawasan, pembinaan pelaku usaha, dan edukasi kepada masyarakat. Keempat, mengembangkan sistem informasi pangan daerah yang terpadu guna mendukung pengambilan kebijakan dan pemantauan harga pangan strategis. Kelima, memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam.

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kota Batam adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, fungsinya antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan.
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan dinas.

3. Kelompok Tani Pokusma

a. Sejarah Pembentukan dan Dinamika Kelembagaan

Kelompok Tani Pokusma merupakan perkumpulan petani yang tersebar di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, merupakan salah satu organisasi penggerak pertanian perkotaan yang memiliki rekam jejak panjang di Kota Batam. Eksistensi kelompok ini telah bertahan dan beroperasi aktif sejak awal pembentukannya pada kisaran tahun 2007²³. Pada fase awal berdirinya, Poktan Pokusma bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan pecahan dari hasil pemisahan program Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Jaya. Pemisahan ini dipicu oleh kesadaran para anggota untuk membentuk kelompok tani mandiri agar sistem tata kelola organisasi menjadi lebih fokus, efisien, dan efektif, terutama dalam hal penyerapan serta pengelolaan bantuan langsung dari pemerintah. Transformasi kelembagaan ini membuktikan bahwa Pokusma memiliki inisiatif kemandirian administratif yang kuat sejak awal berdirinya.

²³ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Pokusma, Suminto, 24 Juni 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

b. Sistem Pengelolaan Lahan dan Fokus Komoditas

Dalam operasional budidayanya, ke-20 anggota aktif Pokusma mengelola lahan pertanian sekitar 0.5 hektar per anggota, jika di akumulasikan menjadi sekitar seluas delapan hektare. Lahan yang dikelola oleh anggota Kelompok Tani Pokusma tersebar di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung. Fokus utama budidaya anggota Kelompok Tani adalah tanaman cabai, serta sayuran pendamping seperti mentimun dan kacang panjang.

Tantangan terbesar dalam budidaya ini adalah kondisi topografi tanah Batam yang didominasi oleh material sisa bauksit dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, ditandai dengan tingkat keasaman (pH) di bawah angka 6,5. Untuk menyiasati kendala ekologis ini, para petani Pokusma dituntut untuk menerapkan teknik budidaya yang presisi, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam program edukasi Sekolah Lapang. Dimana program edukasi Sekolah Lapang ini adalah program dari kementerian pertanian dimana para petani di berikan arahan mengenai pemberdayaan tanaman secara langsung di lapangan.

c. Status Legalitas Lahan

Walaupun Kelompok Tani Pokusma tergolong sangat mandiri secara operasional, pengembangan usaha mereka terus dihantui oleh ketidakjelasan status legalitas lahan. Hingga saat ini, area seluas delapan hektare yang menjadi urat nadi perekonomian 20 anggota Kelompok Tani Pokusma belum mengantongi izin resmi (legalitas) dari otoritas pemangku wilayah, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ketiadaan payung hukum ini menempatkan Kelompok Tani Pokusma pada posisi yang sangat rentan. Hal ini tidak hanya mematikan keberanian anggota untuk melakukan investasi jangka panjang seperti membangun infrastruktur irigasi permanen, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi kelompok untuk mengakses beberapa program-program perluasan tanam berskala nasional yang

mensyaratkan sertifikat kepemilikan lahan sebagai prasyarat administratif²⁴.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penciptaan Iklim yang Mendukung (*Enabling*) dalam Pengembangan Tanaman Hortikultura Bagi Kelompok Tani

Penciptaan iklim yang mendukung atau *enabling* merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah bertugas menciptakan suasana yang memungkinkan potensi kelompok tani untuk terus berkembang secara mandiri²⁵. Dalam konteks Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mewujudkan iklim tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi dua arah yang intensif bersama para petani di lapangan.

Penyuluh pertanian menyatakan tugasnya adalah sebagai pendamping dan penghubung antara pemerintah dan juga petani yang ada.

“Tugas penyuluh rasanya kami itu sebagai motivator juga, fasilitator. Yaitu penyambung lidah lah istilahnya dari pemerintah ke petani, ujung tombaknya. Misalkan ada pengajuan pupuk subsidi, itu melalui penyuluh dulu, baru diajukan oleh penyuluh melalui e-referral²⁶.”

“Pendampingan kami itu biasanya lebih berkembang kami buat pertemuan atau buat sekolah lapang tadi, uji coba²⁷.”

Peran strategis ini secara langsung diimplementasikan oleh penyuluh pertanian lapangan yang bertugas sebagai motivator sekaligus fasilitator penyambung lidah antara pemerintah dan kelompok tani. Pelaksanaan pendampingan lapangan ini diorkestrasi langsung oleh tenaga penyuluh pertanian yang telah mengantongi legitimasi hukum berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

²⁴ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

²⁵ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

²⁶ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

²⁷ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Pertanian (BPPSDMP) Nomor 56 Tahun 2026²⁸. Pendekatan komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formal di dalam ruang kantor, melainkan juga menyesuaikan dengan dinamika aktivitas petani, seperti mengadakan pertemuan tatap muka pada malam hari untuk mengakomodasi jadwal mereka yang sibuk di kebun sejak pagi hari.

Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menegaskan pertemuan bisa disesuaikan dengan jadwal dari para petani yang hendak dikunjungi

“Kami mengikuti agenda rutin dengan kelompok tani, misalnya pertemuan bulanan. Jika kami tidak bisa datang pagi atau siang karena mereka masih di kebun, kami biasanya bertemu mereka di malam hari sambil mendengarkan keluhan kesah mereka dan mencari solusinya²⁹.”

Melalui forum pertemuan-pertemuan tersebut, perwakilan dinas berupaya mendengarkan keluhan kesah petani sekaligus membagikan informasi spesifik terkait program bantuan penanaman yang akan diluncurkan.

Gambar 4.4. Pertemuan Petani Kota Batam dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam



Sumber: Dokumentasi Pribadi

²⁸ Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 56 Tahun 2026

²⁹ Wawancara dengan Staf Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Rio Bima Handika, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Kehadiran penyuluh dan staf dinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah terbukti cukup efektif dalam menciptakan ruang diskusi yang terbuka bagi para petani. Hal ini didukung oleh pernyataan anggota kelompok tani yang menyatakan bahwa pihak dinas beberapa kali mengajak mereka melakukan pertemuan lintas kelompok untuk saling berbagi informasi dan mendengarkan aspirasi.

Anggota Kelompok Tani Pokusma mengkonfirmasi adanya pertemuan yang dilakukan bersama perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam upaya sosialisai ataupun kegiatan dengar pendapat dari para petani.

"Ada, beberapa kali sempat dinas mengajak pertemuan juga dengan petani- petani lainnya dari kelompok tani yang berbeda untuk saling berbagi informasi atau sosialisasi sambil dengar keluh kesah dari para petani³⁰."

Demikian juga hal yang sama disampaikan oleh ketua pengurus kelompok tani, yang membenarkan adanya dorongan motivasi dari dinas melalui pertemuan berkala untuk membahas teknis budidaya tanaman hortikultura yang dirasa cukup rumit.

"Ada, sering juga. Terkadang ada pertemuan untuk membahas program pembudidayaan cabai atau sayur. Memang yang paling sering mendapat bantuan di Batam ini adalah fokus ke cabai. Kalau sayur, rata-rata semua petani di sini sudah pandai. Budidaya cabai itu yang agak ribet, makanya sering diadakan pertemuan-pertemuan pembinaan³¹."

Melalui pertemuan antara para petani dan perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Dinas juga terus mengingatkan tujuan dari pembentukan dari Kelompok Tani ini adalah sebagai tempat selang berdiskusi terhadap hal apa yang terjadi dengan para petani. Hal ini disampaikan oleh ketua Kelompok Tani Pokusma.

³⁰ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Putra, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

³¹ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

“Dipertemuan yang diadakan dinas ini juga mengingatkan tujuan dibentuknya kelompok tani, agar Anggota Kelompok tani saling jaga dan menghadapi masalah bersama³².”

Kepala bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menegaskan menyatakan salah satu upaya dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan para petani untuk melakukan tugasnya adalah untuk meningkatkan kerukunan antar anggota kelompok tani.

“Upaya kami untuk mewujudkan ekosistem pertanian yang sehat agar pertanian tetap berjalan lancar adalah setelah melakukan pertemuan kami mengingatkan untuk para petani ini agar saling jaga. Selain itu kami juga berusaha untuk selalu mendengar permasalahan yang petani hadapi, agar mereka merasa mendapat perhatian dari pemerintah³³”

Kerukunan antar anggota Kelompok Tani merupakan hal yang fundamental bagi terbentuknya iklim pertanian yang sehat. Jika anggota kelompok saling jaga maka berbagai tantangan dalam pertanian dapat dihadapi bersama dan diharapkan beban yang dihadapi tidak terasa berat. Penyuluhan dari perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mengenai pentingnya kesadaran saling menjaga antar anggota Kelompok Tani terbukti melekat kepada anggota Kelompok Tani Pokusma, hal ini terbukti sesuai perkataan Roni anggota Kelompok Tani ketika ditanyai apa manfaat dari terbentuknya Kelompok Tani menurut bapak, mereka menjawab:

“Sebagai tempat berbagi informasi sih, misalnya kita mau coba tanaman baru tapi belum pernah, kita bisa coba tanya ke anggota kelompok yang lain³⁴.”

³² Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

³³ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

³⁴ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Roni, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

“Bisa dibilang kelompok tani ini sebagai ruang bersosialisasi bagi para petani, tempat saling berbagi informasi juga bagi saya³⁵.”

Meskipun upaya komunikasi dan motivasi kesadaran berkelompok telah berjalan dengan baik, penciptaan iklim pendukung bagi Kelompok Tani Fokuma saat ini menghadapi permasalahan, yaitu ketidakmampuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Pokusma terutama yang berkaitan dengan lahan. Biasanya kelompok tani mampu menghadapi berbagai masalah melalui diskusi kelompok, namun ada permasalahan yang Kelompok Tani sulit untuk mengatasinya sendiri, yaitu permasalahan mengenai Status lahan seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota Kelompok Tani Pokusma.

“Kalo untuk bantuan dari dinas untuk menyelesaikan masalah kelompok sih jarang ya, soalnya kami juga jarang untuk minta bantuan ke sana. Tapi ada nih mas anggota Kelompok yang kena gusur tapi dinas belum bisa bantu karena udah diluar wewenang mereka³⁶.”

Status lahan yang tidak menentu serta tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri menimbulkan kecemasan yang terus-menerus bagi para pelaku usaha tani di wilayah tersebut. Ketiadaan izin kepemilikan lahan ataupun izin penggunaan lahan membuat posisi petani menjadi sangat rentan terhadap ancaman penggusuran sepihak. Hal ini secara langsung juga menghambat realisasi beberapa program pemberdayaan unggulan dari pemerintah pusat, seperti perluasan penanaman padi gogo yang menuntut adanya dokumen kepemilikan lahan sebagai syarat administratif mutlak.

“... Masalah terbesarnya itu lahan, nggak ada legalitasnya. Legalitas nggak pasti. Bisa jadi ini kita udah kembangkan padi gogo ternyata kena gusur, contohnya di Sei Binti. Dan syaratnya pula untuk pengajuan kegiatan dari padi gogo sama jagung ini, surat legalitas lahan. Itulah yang menjadi kendala. Kami udah sampaikan juga sama

³⁵ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

³⁶ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Putra, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

BRNP bagaimana solusinya, karena di Batam ini memang legalitas lahan menjadi permasalahan utamanya³⁷.”

Kekhawatiran mendalam terkait ketidakpastian lahan ini secara gamblang disuarakan oleh ketua kelompok tani yang mengeluhkan ketiadaan fasilitasi tata kelola lahan dari pemerintah, yang sewaktu-waktu dapat menggusur kebun mereka.

“Harapan utama dari kelompok tani sebenarnya adalah kejelasan status lahan. Kami sering bingung. Saya berkebun dari 2007 sampai sekarang, status lahan tidak jelas. Kalau ada penggusuran, ya digusur saja. Seharusnya pemerintah bisa menata, melihat Batam ini butuh pasokan sayur, jadi lahan pertanian diatur ulang atau difasilitasi. Sampai sekarang belum ada pemerintah mengatur petani dialokasikan ke mana, pakai sistem sewa atau bagaimana, itu belum ada sama sekali³⁸.”

Hal ini juga disampaikan oleh anggota kelompok tani Pokusma, yang merasa sangat membutuhkan informasi atau intervensi terkait perizinan alih fungsi lahan agar insiden penggusuran lahan yang pernah menimpa rekan mereka tidak terulang kembali.

“Mungkin selain dari informasi mengenai bantuan tani, kami juga butuh informasi mengenai izin alih fungsi lahan, soalnya ada rekan kami yang kena gusur karena lahannya mau dibikin PT³⁹.”

Demikian juga hal yang sama disampaikan oleh penyuluh pertanian lapangan, yang menegaskan bahwa masalah legalitas adalah akar kendala terbesar yang membuat program terhenti di tengah jalan karena lahan garapan tiba-tiba diambil alih oleh otoritas wilayah.

“Pernah, pernah. Contohnya di Sei Binti. Itu kan ada dulu pengembangan sayur-sayuran. Tiba-tiba kegiatan udah berjalan nih, petani udah nanam, eh tiba-tiba lahannya digusur. Kita nggak bisa

³⁷ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

³⁸ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

³⁹ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Fauzi, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

intervensi di situ karena masalahnya yang mengelola Batam kan BP Batam. Lahan di situ kami sebagai pembinaan saja⁴⁰.”

Realitas lapangan ini menunjukkan bahwa pilar *enabling* dari Dinas belum dapat terealisasi secara penuh apabila kepastian ruang bagi aktivitas pertanian belum dituntaskan melalui sinergi kebijakan tata ruang.

Tabel 4. 3 Tabel petani yang terdaftar di dalam sisteam Simluhtan.

NO	KECAMATAN	JENIS KELOMPOK				KELOMPOK YANG AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH KESELURUHAN	JUMLAH PETANI TERGABUNG KE KELOMPOK YANG AKTIF
		KELOMPOK TANI	KELOMPOK TERNAK	KWT	POHLASAR				
1.	Batam Kota	0	0	16	0	16	10	26	358
2.	Batu Aji	4	0	7	0	11	0	11	168
3.	Batu Ampar	0	0	8	0	8	1	9	175
4.	Belakang Padang	7	3	2	0	12	4	16	110
5.	Bengkong	0	0	10	1	11	0	11	180
6.	Bulang	4	7	2	0	13	9	22	193
7.	Galang	43	12	6	0	61	14	75	1.090
8.	Lubuk Baja	0	0	6	0	6	1	7	85
9.	Nongsa	5	0	3	0	8	2	10	140
10.	Sagulung	16	0	10	0	26	2	28	609
11.	Sungai Beduk	16	0	15	0	30	9	39	579
12.	Sekupang	4	2	8	0	14	6	20	303
Jumlah		98	24	93	1	216	58	274	3.990

Sumber: <https://simluh.pertanian.go.id/> diakses pada 29 MEI 2026 ⁴⁰

Simluhtan (Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian) adalah sebuah sistem basis data berbasis *online* yang dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Secara ringkas, sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data terpadu yang memuat informasi akurat mengenai kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluh, serta kelembagaan pelaku utama seperti kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok wanita tani (KWT).

Berdasarkan data dari simultan yang di akses pada 29 Mei 2026, jumlah Kelompok tani yang berada di Kota Batam berjumlah 98. Kecamatan dengan petani terbanyak ada di Kecamatan Galang sebanyak 43 Kelompok Tani atau 43% dari total Kelompok tani yang ada di Kota Batam.

⁴⁰ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

2. Peningkatan Kapasitas dan Potensi Budidaya (*Empowering*) Kelompok Tani

Upaya penguatan potensi atau *empowering* menuntut adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk memampukan masyarakat melalui penyediaan fasilitas fisik maupun dukungan pengetahuan teknis agar mereka dapat mandiri⁴¹. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mengimplementasikan pilar ini dengan berpedoman pada dua indikator utama, yakni distribusi Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprota) dan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) serta pelatihan.

Penyaluran bantuan fisik yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tidak dilakukan secara serampangan, melainkan diikat oleh tata tertib administrasi yang ketat di mana kelompok penerima wajib terdaftar secara resmi di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Hal ini ditegaskan oleh staf bidang pertanian mengenai syarat mutlak pendataan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok tani.

“Kelompok tani harus membuat proposal pengajuan dan wajib memiliki SK kelompok yang masih aktif. Jika tidak ada SK, minimal ada Surat Keterangan dari Penyuluh bahwa mereka aktif di Simluhtan. Jika belum ada kuota yang terpenuhi, di awal tahun (Januari) kami akan mencari petani yang mau, dengan mengecualikan petani yang sudah dapat bantuan di tahun sebelumnya⁴².”

Untuk jenis dan jumlah bantuan yang didistribusikan, dinas menyesuaikannya dengan profil dan fokus budidaya masing-masing kelompok. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025⁴³, alokasi bantuan difokuskan pada kawasan cabai seluas 20 hektare dan kawasan sayuran seluas 10 hektare. Kepala Bidang Tanaman Pangan menguraikan

⁴¹ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

⁴² Wawancara dengan Staf Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Rio Bima Handika, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

⁴³ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kota Batam.

secara spesifik ragam sarana fisik yang telah disalurkan kepada kelompok sasaran tersebut.

“Distribusi bantuan disesuaikan dengan profil dan kapasitas masing-masing kelompok, misalnya fokus mereka di kawasan cabai atau sayuran. Tahun lalu (2025), bantuan difokuskan pada kawasan cabai seluas 20 hektar dan sayuran 10 hektar. Rinciannya meliputi benih, bibit, pupuk makro seperti Urea, NPK, TSP, KCL, pupuk tambahan (kompos organik), dan plastik mulsa⁴⁴.”

Penyaluran bantuan fisik ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan diikat oleh tata tertib administrasi publik yang sangat ketat sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2024. Berdasarkan regulasi daerah tersebut, setiap kelompok penerima bantuan diwajibkan untuk terdaftar secara resmi di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan harus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST)⁴⁵.

Gambar 4.5. Bantuan Pupuk Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma



Sumber: Dokumentasi Pribadi

⁴⁴ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁴⁵ Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 62 Tahun 2024 tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kelengkapan logistik ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani di tingkat akar rumput. Anggota Kelompok Tani Pokusma, Bapak Putra, mengonfirmasi bahwa pasokan sarana produksi tersebut sangat tepat sasaran dan dibagikan secara adil sesuai perhitungan kebutuhan luasan lahan yang mereka kelola.

“Bantuan ini turun biasanya kalau ada program penanaman cabai. Bantuannya biasanya berupa bibit, pupuk, terkadang obat-obatan (pestisida), dan kompos. Bantuan dari dinas yang paling berguna itu pupuk subsidi, obat tanaman dan bibit. Manfaatnya ya jadinya pengeluaran untuk menanam bisa diperkecil... Saya merasa dinas cukup adil dalam memberikan bantuan, karena sudah ada perhitungannya, jadi bakal sesuai dengan kebutuhan petani⁴⁶.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Pokusma, Bapak Suminto, yang menegaskan bahwa meskipun bantuan tidak dapat menanggung keseluruhan biaya penanaman karena keterbatasan lahan mereka yang sempit dimana rata-rata 0,5 hektare per orang, subsidi tersebut sudah sangat krusial dalam menekan biaya operasional.

“Bantuan ini biasanya turun kalau ada program bantuan dari dinas. Bantuannya biasanya berupa pupuk, obat-obatan (pestisida), dan kompos. Bantuan dari Dinas ini biasanya menutupi sekitar 50% dari kebutuhan, dan sisa kekurangannya kami tutupi sendiri pakai modal kami... Salah satu manfaat utamanya itu bisa mengurangi modal pengeluaran untuk penanaman. Selain itu, pemberian bantuan ini juga memberi motivasi agar kami memproduksi lebih banyak⁴⁷.”

Meskipun pendistribusian benih dan pupuk berjalan lancar, pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) rupanya masih menjadi kendala akibat alokasi anggaran yang terbatas. Menghadapi tantangan ini, Kepala Bidang menjelaskan strategi substitusi yang diterapkan di lapangan.

“Terkait pengadaan alsintan, alokasinya agak terbatas. Sebagai solusi saat ini, petani menerapkan sistem sewa-menyewa alat antar

⁴⁶ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Putra, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

⁴⁷ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

sesama petani yang sudah bergabung ke grup para petani perkecamatan⁴⁸. ”

Namun demikian, pada tahun sebelumnya dinas pernah memberikan intervensi spesifik terkait alsintan dalam bentuk rekomendasi bahan bakar yang fungsinya sangat vital untuk operasional pompa penyiraman. Hal ini diklarifikasi oleh penyuluh pertanian lapangan.

“Operasional alsintan ini juga kami perhatikan. Tahun kemarin ada bantuan berupa rekomendasi bahan bakar minyak (BBM). BBM ini sangat penting untuk menjalankan alsintan kelompok tani, khususnya pompa air, karena jarak akses penyiraman antara kolam dengan lahan terkadang cukup jauh dan tinggi⁴⁹. ”

Selain penyediaan instrumen fisik (*Saprotan*), upaya *empowering* juga dinilai dari indikator kedua, yakni kuantitas dan metode pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) serta pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyadari perlunya efisiensi dalam pelaksanaan pelatihan ini, sehingga mereka merancang skema perwakilan untuk setiap program Bimtek. Kepala Bidang Tanaman Pangan menjelaskan mekanisme pelatihan percontohan tersebut.

“Saat peluncuran awal program seperti tahun kemarin (2025) kami berfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan terutama tanaman cabai dan tanaman sayur, kami melakukan pelatihan mengenai tata cara penanaman kepada petani yang mengikuti program. Kami mengundang satu ketua kelompok tani dan satu perwakilan anggota kelompok tani. Selanjutnya ketua dan anggota kelompok tani ini bertugas menyampaikan tata cara penanaman tanaman cabai dan tanaman sayur ke pada anggota Kelompok Tani lainnya yang tidak hadir dalam pelatihan tersebut⁵⁰. ”

⁴⁸ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁴⁹ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁵⁰ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Strategi perwakilan ini diakui secara langsung oleh anggota kelompok tani, Bapak Fauzi, yang membenarkan bahwa partisipasi anggota secara umum tidak dilakukan serentak, melainkan bergantian atau diwakili oleh pengurus kelompok.

“Saya sih jarang ya mas, pernah sih beberapa kali soalnya gantian yang diajak ke sana. Biasanya ketua yang berangkat⁵¹.”

Terkait fokus materi pada pelaksanaan Bimtek, dinas lebih memprioritaskan pelatihan budidaya cabai dibandingkan tanaman sayur. Komoditas cabai dinilai memiliki tingkat kerumitan perawatan yang jauh lebih tinggi dan sangat krusial dalam mengendalikan inflasi daerah. Ketua kelompok tani mengonfirmasi bahwa wawasan anggotanya tentang sayuran daun sudah memadai, namun mereka tetap antusias mengikuti pelatihan penanaman cabai guna membuka ruang diskusi dengan perwakilan dinas.

“Pernah ada dari Dinas, biasanya itu pelatihan khusus untuk penanaman cabai. Kalau untuk sayur-sayuran, rata-rata semua petani di sini sudah pandai merawatnya tanpa perlu dilatih lagi. Walaupun kita sudah tahu menanam secara umum kami tetap hadir kalo di undang soalnya juga ada diskusi setelah bimbingan⁵².”

Selain pelatihan di ruangan saat sosialisasi, proses transfer pengetahuan juga dipraktikkan langsung di lahan melalui pendekatan inovatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi agroklimatologi spesifik Kota Batam. Penyuluh pertanian lapangan memaparkan bagaimana edukasi lapangan harus disesuaikan dengan kontur tanah lokal yang didominasi oleh tanah bauksit miskin unsur hara.

“Petani Batam ini sudah punya banyak pengalaman lapangan, karena tanah di sini jenis bauksit yang miskin unsur hara, beda dengan teori di buku. Kalau ada metode baru di uji lapang dan terbukti berhasil, metode itu langsung kami terapkan dalam skala global ke kelompok tani lain dan disebarkan ke anggota-anggotanya⁵³.”

⁵¹ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Fauzi, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

⁵² Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

⁵³ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Melalui kombinasi penyaluran sarana produksi bersubsidi dan pelatihan terstruktur yang efisien, pilar *empowering* ini secara bertahap berhasil meminimalkan beban modal sekaligus memperkuat kemandirian kognitif para petani dalam menjaga keberlangsungan sektor hortikultura lokal.

3. Perlindungan dan Pemihakan (*Protecting*) terhadap Kelompok Tani Fokuma

Pilar ketiga dalam skema pemberdayaan masyarakat adalah perlindungan (*protecting*), yang berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi oleh pihak yang kuat⁵⁴. Dalam pada sektor pertanian di Kota Batam, bentuk perlindungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dievaluasi melalui dua hal utama, yaitu efektivitas perlindungan harga jual dari manipulasi tengkulak dan kuantitas kebijakan dinas dalam melindungi hak atas lahan pertanian petani.

Perlindungan harga jual, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mengawasi tata niaga komoditas agar hasil panen petani dihargai secara wajar oleh pembeli maupun tengkulak. Kepala Bidang Tanaman Pangan menegaskan bahwa selama mekanisme pasar masih berjalan dalam batas kewajaran, pihak dinas tidak akan melakukan intervensi secara berlebihan, melainkan berfokus pada pencegahan melalui saluran pelaporan dari para petani.

“Selama harga beli dari di tingkat tengkulak masih dalam batas kewajaran, kami biarkan mekanisme pasar berjalan. Kami menghimbau kepada para petani jika tengkulak memainkan harga terlalu tidak wajar mohon untuk dilaporkan kepada kami agar kami tindak lanjuti. Itu salah satu cara kami mencegah permainan harga oleh para tengkulak⁵⁵.”

⁵⁴ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

⁵⁵ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Untuk membekali dan memperkuat daya tawar petani, petugas penyuluh pertanian lapangan juga secara proaktif menjalankan fungsi pengawasan harga di tingkat pasar dan langsung mendiseminasikan hasilnya kepada kelompok binaan.

"Sempat juga kami para penyuluh ini bertugas sekaligus menjadi petugas pasar untuk mengecek harga. Data harga dari pasar itu langsung kami share ke petani, tujuannya agar mereka tahu patokan harga di pasar dan bisa membandingkannya dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak⁵⁶."

Upaya transparansi informasi harga ini diakui berdampak positif oleh anggota kelompok tani di lapangan, yang merasa bahwa interaksi komersial mereka dengan jaringan tengkulak konvensional relatif terhindar dari praktik eksploitasi sepihak. Bapak Roni, selaku anggota kelompok tani, mengonfirmasi tidak adanya permainan harga yang mencolok saat ia menjual hasil panen kebunnya.

"Nggak ada sih mereka (tengkulak) mainin harga ke kami. Kami udah percaya juga kalau pun mereka main harga paling kita jual langsung ke pasar⁵⁷."

Meskipun ancaman tengkulak secara umum mampu ditangani, pilar perlindungan harga ini dihadapkan pada disrupsi pasar yang masif ketika siklus panen raya serentak secara nasional terjadi. Pada fase kritis tersebut, derasnya pasokan barang komoditas hortikultura dari daerah lain memaksa harga jual panen lokal anjlok drastis di bawah standar kewajaran. Ketua Kelompok Tani Pokusma, Bapak Suminto, membeberkan realitas pasar bebas tersebut yang acap kali membuat petani lokal tidak memiliki daya tawar dan terpaksa menerima kerugian.

"Pasti pernah mengalaminya, apalagi kalau barang dari luar Batam seperti Medan, Jawa, dan Lombok masuk semua ke sini. Ditambah lagi kalau bantuan penanaman dari pemerintah turun serentak secara nasional, hasil panennya numpuk dan pasokan kelebihan. Kalau sudah begitu harganya sangat murah dan kita

⁵⁶ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁵⁷ Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Fauzi, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

terpaksa terima harga pasar apa adanya. Saya tidak pernah lapor ke Dinas soal harga anjlok ini⁵⁸."

Merespons anomali kejatuhan harga ekstrem yang merugikan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan langkah penanggulangan taktis berupa penciptaan jalur serapan distribusi alternatif bernama "Cabai Corner". Staf bidang pertanian memaparkan prosedur teknis dari program pengaman pasar ini.

"Jika harganya sudah tidak wajar, petani biasanya akan melapor. Tindakan teknis kami adalah membantu menjualkan hasil panen mereka lewat program "Cabai Corner". Hasil panen petani langsung kami salurkan dan jualkan kepada ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk memotong biaya retribusi dari tengkulak sebagai sasaran utamanya agar harganya tetap terjaga⁵⁹."

Beralih peran dinas memberikan perlindungan terhadap lahan, efektivitas strategi pemberdayaan seketika berbenturan dengan realitas ketiadaan payung kebijakan dinas yang secara utuh mampu melindungi hak ruang produksi milik kelompok tani. Ketiadaan zonasi khusus untuk sektor agraris memicu kerentanan lahan garapan terhadap tingginya laju konversi untuk kepentingan industri. Kepala Bidang Tanaman Pangan mengakui bahwa hal ini merupakan kendala terberat sekaligus titik lemah struktural yang membelenggu kelancaran program mereka.

"Ini tantangan besar. Kendala struktural kita adalah Batam belum memiliki kawasan khusus yang didedikasikan sepenuhnya untuk sentra pertanian. Seandainya Pemko mengalokasikan lahan khusus katakanlah 20 hektar yang dikelola langsung di bawah kendali Dinas dan pihak ketiga, prosesnya akan jauh lebih efisien. Saat ini, kepemilikan lahan mayoritas petani masih menjadi hambatan utama program kami⁶⁰."

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

⁵⁹ Wawancara dengan Staf Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Rio Bima Handika, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

⁶⁰ Wawancara kepala bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kota Batam, Meili Suryanti, S.P. 24 Juli 2026, Kantor Dinas Kerahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Staf bidang pertanian menambahkan bahwa pengawasan administratif untuk perlindungan lahan menjadi sangat sulit dilakukan karena Batam memang belum menerapkan sistem *Food Estate* resmi. Kelemahan struktural ini dipertegas oleh penyuluh pertanian lapangan yang menyatakan bahwa instansi dinas sama sekali tidak memiliki kapasitas legal maupun kewenangan (yurisdiksi) untuk mengintervensi sengketa agraria, mengingat status tata ruang dikelola penuh oleh otoritas wilayah.

"Masalah terbesar adalah legalitas lahan yang tidak pasti. Pernah terjadi program pengembangan sayur-sayuran di Sei Binti, kegiatan sudah berjalan dan petani sudah menanam, tapi tiba-tiba lahannya digusur... Kalau sudah urusan gusur-menggusur lahan, kami dari penyuluh tidak bisa intervensi karena itu murni kewenangan BP Batam, kami di lahan tersebut hanya sebatas memberikan pembinaan pertanian saja⁶¹."

Absennya intervensi perlindungan aset lahan ini melahirkan kecemasan di kalangan petani yang merasa terpinggirkan. Anggota Kelompok Tani Pokusma, Bapak Fauzi, membenarkan bahwa ancaman penggusuran telah menjadi momok nyata yang berada di luar kapasitas jangkauan bantuan dinas.

"Ada nih mas anggota kelompok yang kena gusur tapi dinas belum bisa bantu karena udah di luar wewenang mereka. Sejauh yang saya tau tidak ada ya, soalnya setau saya itu juga bukan bidang dari dinasnya.⁶²"

Ketidakpastian ini pada akhirnya menempatkan pemenuhan legalitas lahan sebagai tuntutan dan harapan terbesar dari komunitas pertanian demi keberlanjutan roda ekonomi mereka. Ketua Kelompok Tani Pokusma merangkum keresahan tersebut, menyoroti belum adanya wujud fasilitasi sistem alokasi maupun penyewaan lahan yang jelas dari institusi negara sejak belasan tahun silam.

"Ini masalah paling utama di Batam. Harapan utama dari kami kelompok tani sebenarnya adalah kejelasan status lahan. Saya berkebun dari tahun 2007 sampai sekarang, status lahannya tidak

⁶¹ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 24 Juli 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁶² Wawancara dengan anggota Kelompok Tani Fokusma, Roni, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

*jelas. Kalau sewaktu-waktu ada penggusuran, ya digusur saja. Sampai saat ini sama sekali belum ada pemerintah memfasilitasi, mengatur tata ruang lahan pertanian, atau menyediakan lahan dengan sistem sewa bagi petani*⁶³."

Situasi ketiadaan perlindungan ruang ini berkorelasi langsung dengan fenomena konversi lahan pertanian berskala masif akibat tingginya tekanan pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memaksa kawasan agraris beralih fungsi menjadi area permukiman maupun industri⁶⁴.

Konversi lahan ini mengakibatkan pengaruh buruk pada produktivitas produksi tanaman hortikultura ini didukung oleh temuan langsung di lapangan yang mengungkap bahwa insiden penggusuran paksa secara besar-besaran di lumbung pangan Pulau Rempang menjadi aktor utama di balik terganggunya luasan area panen dan merosotnya produksi agregat daerah khususnya di tahun 2025.

*"...Hal penurunan peroduksi tanaman pangan di Kota Batam terjadi karena terjadi penggusuran di pulau Rempang. Pulau Rempang ini merupakan daerah dengan petani terbanyak di Kota Batam jadinya karena mereka kena gusur jadinya produksi pangan di kota Batam sangat terganggu. Untuk efisiensi itu enggak garuh banget dengan produksi tanaman pangan, itu hanya berpengaruh ke anggaran internal dari dinas atau ke ASN-nya aja*⁶⁵".

Demikian juga hal yang sama dapat diamati secara jelas pada tren penyusutan luas panen berbagai tanaman Hortikultura contohnya tanaman kacang panjang yang terus terdegradasi dari 166 hektar pada tahun 2023 menjadi 144 hektar pada penghujung tahun 2025.

⁶³ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto, 25 Juli 2026, Sagulung Sungai Pelunggut.

⁶⁴ Akhirul (2020), *Loc. Cit.* Hal. 13

⁶⁵ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 19 Juni 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Tabel 4.3. Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Batam 2023-2025.

Jenis Tanaman	2023	2024	2025
Bawang Daun/Scallion(ha)	49	37.5	27
Bawang Merah/Shallots(ha)	3	7	2
Buncis/string bean(ha)	11	14	-
Kacang Panjang/Long Beans(ha)	166	158.5	144
Ketimun/Cucumber(ha)	186	160	145
Terung/Eggplant(ha)	28	26	17
Tomat/Tomato(ha)	6	20	15
Wortel/Carrot(ha)	-	2	1
Cabai Keriting/Chili/Curly chili(ha)	155	127	116.75

Sumber: <https://batamkota.bps.go.id/id>, Diakses pada Juni 2026

Realitas data lapangan tersebut membuktikan bahwa fasilitasi komunikasi, penyuluhan, bantuan fisik dan perlindungan pasar tidak akan berdampak menyeluruh bagi keberlanjutan produksi apabila basis lahan tempat petani bernaung justru terancam oleh pembangunan fisik perkotaan⁶⁶.

Permasalahan lahan di lapangan tersebut membuktikan bahwa perwujudan pilar *protecting* di Kota Batam cenderung sangat tidak berimbang, instrumen birokrasi sukses menjaga stabilitas ancaman harga pasar operasional harian, namun secara fundamental lumpuh tatkala harus memberikan kepastian perlindungan atas ruang agraris yang menjadi tumpuan utama petani untuk berproduksi.

C. Analisis Data

1. Pemberdayaan Kelompok Tani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urgensi perumusan strategi pemberdayaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sejatinya berangkat dari ketimpangan struktural antara kapasitas produksi lokal dan tingginya laju konsumsi masyarakat. Berdasarkan temuan data hasil wawancara di lapangan, terungkap sebuah konstelasi persentase pemenuhan pangan yang sangat

⁶⁶ Akhirul (2020), *Loc. Cit.* Hal. 13

mengkhawatirkan. Kelompok Tani reguler (termasuk di dalamnya Kelompok Tani Pokusma) saat ini hanya mampu berkontribusi sekitar 20% dalam menopang total pemenuhan kebutuhan pangan harian penduduk Kota Batam. Sementara itu, entitas Kelompok Wanita Tani (KWT) hanya menyumbang rasio produksi sebesar 5%⁶⁷.

Akumulasi data tersebut menegaskan bahwa kapasitas maksimal produksi pertanian dari seluruh elemen masyarakat di Kota Batam hanya mampu memenuhi 25% dari total kebutuhan pangan daerah. Fenomena minimnya kontribusi lokal ini secara teoretis merupakan konsekuensi logis dari penurunan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) akibat masifnya alih fungsi lahan. Hal ini sejalan dengan kajian Akhirul dkk., yang menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan pasti akan berkorelasi langsung dengan tergerusnya lahan agraris demi kepentingan ekspansi industri dan permukiman⁶⁸. Pembangunan tata ruang yang bias terhadap sektor industri (*urban bias*) di Batam secara sistematis meminggirkan ruang hidup pertanian, sehingga membatasi ruang gerak petani untuk meningkatkan skala produksinya secara mandiri.

Sebagai akibatnya, Kota Batam berada dalam tingkat kerentanan pangan yang masif karena 75% sisa pasokan komoditas hortikultura dan bahan pokok harus diimpor dari luar daerah. Tingginya angka ketergantungan pasokan eksternal ini memvalidasi analisis Rozaki dkk. terkait ketimpangan ketahanan pangan wilayah, di mana kota non-agraris sangat rentan terhadap guncangan rantai pasok dan fluktuasi harga (inflasi) nasional⁶⁹. Kondisi darurat inilah yang menempatkan intervensi DKPP melalui pemberdayaan petani baik pada pilar *enabling*, *empowering*, maupun *protecting* tidak lagi sekadar bersifat program rutinitas, melainkan bertransformasi menjadi strategi esensial pemerintah untuk mencegah runtuhnya ekosistem pertanian perkotaan lokal."

⁶⁷ Wawancara dengan Penyuluh Kelompok Tani Kelurahan Sei Pelunggut, Ricky (2026), 19 Juni 2026, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

⁶⁸ Akhirul (2020), *Loc. Cit.* Hal. 13

⁶⁹ Rozaki (2023), *Loc. Cit.* Hal. 7

Strategi utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan kelompok tani di tahun 2025 secara garis besar cukup bersandar pada pewujudan tiga pilar utama pemberdayaan, yakni penciptaan iklim, penguatan potensi, dan perlindungan. Implementasi awal dari strategi ini bertumpu pada pilar penciptaan iklim pendukung atau *enabling* yang diukur melalui indikator intensitas komunikasi dan pendampingan serta kemudahan akses informasi⁷⁰.

Pendekatan dialogis ini dieksekusi secara tersusun melalui penetapan frekuensi kunjungan lapangan penyuluh minimal tiga kali dalam setahun untuk meninjau kelayakan dan mengevaluasi dampak bantuan, yang kemudian diperkuat dengan pemanfaatan saluran digital berupa grup *WhatsApp* khusus bagi para ketua kelompok tani di tingkat kecamatan.

Fleksibilitas komunikasi informal dan pemusatan arus informasi melalui representasi ketua kelompok ini menjadi strategi krusial untuk mencegah terjadinya kebuntuan informasi, sebuah kelemahan struktural yang sebelumnya menjadi temuan utama dalam studi pemberdayaan *urban farming* oleh Astiti dkk. di Surakarta⁷¹.

Interaksi yang tertata dari perpanjangan tangan dinas tersebut terbukti efektif dalam merawat kohesi sosial, di mana dinas memosisikan dirinya sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian masalah secara mandiri di internal kelompok terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi teknis. Realitas operasional ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari bahwa program pemberdayaan tidak dapat berjalan tanpa adanya keterhubungan informasi yang inklusif bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah⁷².

Merespons tuntutan keadaan alam dan tantangan agronomi di Kota Batam, strategi berikutnya dieksekusi melalui pilar peningkatan kapasitas dan potensi budidaya atau *empowering*⁷³. Implementasi pilar ini dinilai melalui

⁷⁰ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

⁷¹ Astiti, (2021). *Loc. Cit.* Hal. 6

⁷² Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

⁷³ *Ibid.*

implementasi terhadap dua aspek ini, yakni kuantitas distribusi bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprota) serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan. Pemerintah daerah mendistribusikan logistik berupa benih unggul, pupuk makro (Urea, NPK, TSP, KCL), dan mulsa secara terstruktur, dengan realisasi spesifik yang difokuskan pada 20 hektare kawasan cabai dan 10 hektare kawasan sayuran di tahun 2025.

Khusus untuk kelompok tani Pokusma berikut adalah jumlah bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam kepada kelompok tani Pokusma Pada tahun 2025 berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Pewediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian:

Tabel 4.4. Tabel jumlah bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam kepada kelompok tani Pokusma Pada tahun 2025

No.	Jenis	Nama Barang	Volume
1.	Sarana Penanian	Dekomposer - M21	50 Liter
2.	Obat Tanaman	(Obat Tanaman) Dolomit	20 zak
3.	Sarana Penanian	Plastik Mulsa	10 Roll
4.	Sarana Penanian	Pupuk KCL	6 Zak
5.	Sarana Penanian	Pupuk NPK	6 Zak
6.	Sarana Penanian	Pupuk TSP	8 Zak
7.	Benih Tanaman	Benih Cabai	10 Sachet
8.	Pupuk	Pupuk Organik	176 Karung

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, 2025

Distribusi bantuan material ini diikat oleh prasyarat administrasi yang sangat ketat, di mana kelompok diwajibkan memiliki Surat Keputusan (SK) aktif atau minimal terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Skema birokrasi yang rigid ini sengaja diterapkan oleh dinas untuk menjawab kendala klasik berupa belum meratanya distribusi

bantuan akibat rendahnya kualitas tata kelola kelembagaan, sebagaimana yang dialami oleh Dinas Pertanian Kota Banjar dalam evaluasi Erlina dkk.⁷⁴

Selain memberikan dukungan fisik untuk mereduksi 50% biaya operasional petani, dinas juga merumuskan strategi efisiensi edukasi melalui Bimtek dengan cara hanya mengundang perwakilan (satu ketua dan satu anggota) untuk nantinya membagikan ilmu yang didapatkan kepada anggota lain. Kombinasi antara subsidi sarana yang terukur dan transfer pengetahuan partisipatif yang disesuaikan dengan kondisi ekstrem tanah bauksit ini merupakan wujud nyata dari upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura.

Jawaban paripurna atas rumusan masalah mengenai pemberdayaan kelompok tani ini dikunci melalui penerapan pilar ketiga, yaitu perlindungan atau *protecting*, yang melalui perlindungan harga jual dan perlindungan lahan agraris. Terkait perlindungan harga jual petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara proaktif menjalankan fungsi pengawasan tata niaga dengan menugaskan penyuluh untuk membagikan informasi harga pasar harian, serta merancang program jaring pengaman bernama "Cabai Corner". Program inovatif ini difungsikan untuk menyerap dan mendistribusikan hasil panen lokal kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) ketika harga jual di tingkat tengkulak anjlok secara tidak wajar saat panen raya nasional.

Efektivitas perlindungan komersial ini berhasil membentengi petani dari eksploitasi, sebuah fenomena yang secara teoretis mengonfirmasi kesungguhan dinas dalam merancang cetak biru perlindungan bagi masyarakat marginal.

Namun demikian, pada aspek perlindungan lahan, strategi dinas menemui kegagalan yang nyata akibat ketiadaan wewenang untuk menetapkan kebijakan perlindungan lahan petani. Absennya jaminan legalitas tata ruang ini menyebabkan posisi petani menjadi sangat rentan dan

⁷⁴ Erlina (2022), *Loc. Cit.* Hal. 5

pasrah terhadap ancaman penggusuran sepihak oleh otoritas pemangku wilayah (BP Batam).

Kegagalan pemenuhan hak atas lahan produksi ini secara dasar memvalidasi kesimpulan riset Nippi dkk. di Desa Siawung, yang menegaskan bahwa strategi pemerintah acap kali belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan yang paling substansial dari pengembangan kelompok tani⁷⁵.

Dengan demikian, perwujudan pilar perlindungan di Kota Batam menunjukkan ketimpangan struktural; dinas berhasil mengawal stabilitas ekonomi harian petani di pasar bebas, namun lumpuh secara sistemik dalam menjamin eksistensi ruang hidup agraris mereka.

2. Hasil dan Dampak Nyata Pemberdayaan terhadap Kelompok Tani

Dampak nyata dari implementasi strategi pemberdayaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara mikro (individu/kelompok) berhasil menyentuh aspek efisiensi finansial dan penguatan motivasi para petani. Penyaluran fasilitas fisik berupa Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) terbukti mampu mereduksi tingginya biaya operasional penanaman hingga mencapai angka lima puluh persen.

Keringanan beban modal kerja ini secara psikologis melepaskan kelompok tani dari ancaman kerugian fatal pada fase awal musim tanam hortikultura yang penuh risiko. Fenomena ini sangat selaras dengan landasan teoretis *empowering*, di mana intervensi material dari pemerintah merupakan prasyarat mutlak untuk memampukan masyarakat ekonomi marginal agar dapat menolong diri mereka sendiri⁷⁶.

Keberhasilan distribusi logistik yang tepat sasaran, adil, dan terdata secara ketat di Batam ini sekaligus menjadi pembeda dari temuan Erlina dkk. di Kota Banjar, di mana program pemberdayaan justru berjalan tidak optimal

⁷⁵ Nippi (2019) *Loc. Cit.* Hal. 8

⁷⁶ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

akibat belum meratanya penyaluran bantuan sarana kepada kelompok tani⁷⁷. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar budidaya tersebut, para anggota Kelompok Tani Fokusma merasa termotivasi untuk memproduksi lebih banyak dan terus memelihara mutu tanaman mereka. Efektivitas pilar penguatan potensi ini pada akhirnya bermuara pada terbangunnya resiliensi operasional di tingkat akar rumput untuk menghadapi dinamika ekonomi pertanian harian.

Pemberdayaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Kepada Kelompok Tani Pokusma ditahun 2025 lebih berfokus kepada peningkatan produksi tanaman cabai. Sedangkan ditahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dinas memberikan bantuan berupa peminjaman alat dan mesin pertanian kepada kelompok Tani Pokusam karena sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2024 tentang Kriteria Calon Penerima Dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada tahun 2025 DKPP berhasil meningkatkan produksi tanaman cabai Kelompok Tani Pokusma. Akan tetapi karena Kelompok Tani Pokusma hanya berfokus pada peningkatan produksi tanaman cabai, mengakibatkan tanaman hortikultura lainnya mengalami penurunan produksi seperti tabel berikut:

Tabel 4. 6 Perkiraan hasil panen Kelompok Tani Pokusma Tahun 2024-2025

Jenis Tanaman	Tahun	
	2024	2025
Cabai Keriting	130 kw	245 kw
Terung	30 kw	16 kw
Kacang panjang	159 kw	112 kw
Mentimun	166 kw	113 kw

Sumber: Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Fokusma, Suminto

⁷⁷ Erlina (2022), *Loc. Cit.* Hal. 5

Tabel diatas menunjukkan peningkatan hasil produksi naik sekitar 88.5% dari pada tahun sebelumnya yang awalnya hanya 130 kuintal ditahun 2024 menjadi 245 kuintal ditahun selanjutnya yaitu tahun 2025. Namun tidak dengan tanaman lainya yang Kelompok Tani Pokusma tanam, menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan mengenai peningkatan produksi tanaman cabai berjalan sesuai dengan keinginan terbukti dengan meningkatnya hasil panen tanaman cabai namun juga mengakibatkan menurunkan produksi tanaman lainya.

Fenomena ini sejalan dengan Teori Batas Kemungkinan Produksi (PPF), di mana pemusatan sumber daya lahan dan tenaga pada satu komoditas yang mendapat intervensi penuh pemerintah akan memunculkan biaya peluang (opportunity cost) berupa penurunan kapasitas pada komoditas lainnya.⁷⁸

Meskipun capaian pemberdayaan di tingkat mikro menunjukkan hasil operasional yang positif, realitas makro (lokal/daerah) terkait agregat hasil panen tanaman pangan secara umum di Kota Batam pada tahun 2025 justru memperlihatkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Tabulasi data statistik mengonfirmasi adanya penyusutan luasan panen secara kontinu pada sejumlah komoditas strategis, salah satunya adalah luasan panen kacang panjang yang terdegradasi dari 166 hektare pada tahun 2023 menjadi hanya 144 hektare di akhir tahun 2025.

Merosotnya kapasitas produksi daerah ini sama sekali bukan bersumber dari kegagalan program edukasi teknis dinas, melainkan dipicu secara eksklusif oleh tragedi penggusuran lahan agraris secara masif di kawasan Pulau Rempang yang berstatus di luar yurisdiksi perlindungan dinas. Mengingat Pulau Rempang merupakan kantong demografi dengan populasi petani terbanyak di Batam, hilangnya aset ruang produksi di wilayah tersebut memberikan pukulan telak yang langsung meruntuhkan stabilitas suplai pangan kota secara keseluruhan.

⁷⁸ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 18-20.

Kegagalan struktural ini secara teoretis membuktikan bahwa pilar penciptaan iklim pendukung (*enabling*) dan perlindungan (*protecting*) adalah fondasi absolut, tanpa adanya kepastian ruang hidup yang aman, segala bentuk penguatan kapasitas sebaik apa pun menjadi tidak berdampak secara sistemik⁷⁹.

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi jaminan legalitas lahan ini turut memvalidasi kesimpulan Nippi, yang menegaskan bahwa strategi pemerintah acap kali belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan yang paling substansial dari pengembangan kelompok tani⁸⁰. Pemaknaan atas kontradiksi data ini secara utuh menjawab rumusan masalah, bahwa operasionalisasi strategi pemberdayaan di Kota Batam sejatinya telah dieksekusi dengan sangat terukur berdasarkan indikator distribusi bantuan dan pelatihan, namun impak akhirnya menjadi tereduksi dan gagal mendongkrak produksi daerah akibat nihilnya perlindungan hukum atas kepemilikan lahan agraris.

3. Hambatan yang Terjadi Selama Proses Pemberdayaan

Pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani di Kota Batam dihadapkan pada eskalasi hambatan struktural yang sangat fundamental, dengan episentrum masalah terletak pada ketiadaan jaminan legalitas tata ruang lahan pertanian. Tekanan pertumbuhan penduduk yang masif telah memicu konversi lahan agraris menjadi kawasan industri, yang secara tragis berujung pada penggusuran paksa para petani di lumbung pangan Pulau Rempang. Hambatan yuridis dan spasial ini membuktikan bahwa sebagus apa pun iklim pendukung (*enabling*) yang dibangun oleh dinas melalui ragam jalur komunikasi dan pendampingan, semuanya akan runtuh apabila basis ekologi produksi petani tidak mendapatkan perlindungan mutlak dari otoritas pemangku wilayah.

⁷⁹ Ginandjar (1995), *Loc. Cit.* Hal. 9

⁸⁰ Nippi (2019) *Loc. Cit.* Hal. 8

Fenomena destruktif di Batam ini menunjukkan derajat hambatan yang jauh lebih kompleks dan sistemik jika disandingkan dengan temuan Astiti dkk. di Surakarta, di mana kendala pemberdayaan hanya berkisar pada kurangnya wawasan budidaya dan komunikasi institusional yang belum efektif⁸¹.

Ketiadaan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengintervensi regulasi lahan yang dikelola penuh oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, ditambah ketiadaan zonasi *Food Estate*, membuat posisi petani menjadi sangat rentan dan terpinggirkan. Realitas timpang ini mengonfirmasi kelamnya keberlanjutan sektor pertanian lokal apabila pemerintah daerah tidak segera merumuskan regulasi kawasan pertanian permanen yang mengikat secara hukum.

Selain terhimpit oleh sengketa tata ruang, efektivitas pemberdayaan juga terusik oleh hambatan teknis agroklimatologi dan derasny arus persaingan tata niaga komoditas lintas daerah. Secara teknis, anomali cuaca berupa curah hujan ekstrem maupun kemarau panjang sangat berdampak pada terhambatnya operasional lapangan dan pergeseran jadwal tanam kelompok tani.

Ditambah lagi dengan kondisi topografi tanah Batam yang didominasi material bauksit miskin unsur hara, memaksa para petani untuk terus bergantung pada suplai pupuk intensif dan modal operasional yang tinggi (mencapai 1,5 kali lipat dibanding Pulau Jawa) agar produktivitas tanaman tetap terjaga. Dari kacamata ekonomi, siklus panen raya serentak secara nasional selalu menjelma menjadi ancaman mematikan, karena melimpahnya pasokan sayur dan cabai dari luar daerah (seperti Medan, Jawa, dan Lombok) secara sistematis akan menghancurkan standar harga jual produk lokal di pasaran. Dinamika pasar yang terlampau fluktuatif ini memaksa pilar perlindungan (*protecting*) dari pemerintah untuk bekerja ekstra keras melalui

⁸¹ Astiti, (2021). *Loc. Cit.* Hal. 6

intervensi "Cabai Corner" demi menyelamatkan hasil panen petani yang anjlok.

Kompleksitas hambatan eksternal berupa kualitas tanah ekstrem dan tekanan pasar bebas ini memberikan temuan yang sangat kontras dari kesimpulan Erlina dkk⁸². di Kota Banjar, di mana hambatan utama pemberdayaan di wilayah tersebut justru lebih didominasi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia petani secara internal.

Kota Batam, kapasitas kognitif dan pengalaman empiris petani sejatinya sudah sangat mumpuni, namun jerih payah pembinaan tersebut secara ironis tereduksi oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia di internal instansi pemerintah itu sendiri. Kepala Bidang dan staf dinas mengakui bahwa mereka hanya didukung oleh lima orang tenaga lapangan untuk mengawal kurang lebih 1.000 hektare luasan lahan pertanian se-Kota Batam, sebuah rasio pendampingan yang sangat tidak ideal dan menyulitkan pelaksanaan pengawasan administratif yang lebih komprehensif. Selain itu, ketiadaan regenerasi petani juga menjadi ancaman demografis tersendiri, mengingat mayoritas pelaku tani di Batam saat ini telah berusia di atas 40 tahun tanpa adanya minat yang memadai dari generasi muda.

Akumulasi dari ragam hambatan multidimensi mulai dari krisis legalitas lahan, anomali cuaca, keterbatasan personel birokrasi, hingga krisis regenerasi demografi inilah yang pada akhirnya memberikan konklusi menyeluruh atas rumusan masalah, bahwa eksekusi strategi pemberdayaan dinas pada tahun 2025 belum mampu mencapai titik keseimbangan akibat kuatnya disrupsi eksternal yang berada di luar jangkauan kewenangan dinas terkait.

4. Analisis Peran Penyuluh Pertanian sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan

Dalam kerangka manajemen strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, tenaga penyuluh pertanian lapangan tidak

⁸² Erlina (2022), *Loc. Cit.* Hal. 5

hanya berfungsi sebagai penyampai informasi teknis, melainkan bertransformasi menjadi aktor kunci yang menentukan hidup-matinya program pemberdayaan di akar rumput. Peran penyuluh menjadi sangat krusial karena mereka bertindak sebagai mediator yang menjembatani kekakuan birokrasi pemerintah dengan realitas kebutuhan fleksibel para petani. Fenomena ini sangat relevan dengan konsep *Street-Level Bureaucracy* (Birokrasi Garda Terdepan) yang dicetuskan oleh Michael Lipsky, di mana aparaturnya lapangan acap kali harus menggunakan diskresi (kebijaksanaan taktis) mereka untuk mengadaptasi kebijakan formal agar dapat diimplementasikan sesuai dinamika sosial masyarakat di lapangan⁸³.

Beban tanggung jawab penyuluh dalam menjalankan diskresi ini tidaklah ringan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 56/Kpts/SM.040/1/01/2026 tentang Penetapan Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian, alokasi wilayah binaan ditetapkan dengan rasio 1 (satu) orang penyuluh pertanian untuk memegang tanggung jawab penuh atas 1 (satu) wilayah tingkat kecamatan. Mengingat luasnya cakupan geografis dan banyaknya kelompok tani yang tersebar di dalam satu kecamatan, rasio ini menuntut penyuluh untuk menerapkan strategi fleksibilitas birokrasi yang sangat tinggi.

Alih-alih memaksakan jadwal sosialisasi formal pada jam kerja pemerintahan, para penyuluh mengambil langkah proaktif dengan mendatangi kelompok tani (seperti Pokusma) pada malam hari untuk mengakomodasi jadwal petani yang telah kelelahan beraktivitas di kebun sejak pagi hari. Langkah adaptif ini secara empiris mengonfirmasi temuan riset Astiti dkk. di Surakarta, yang menegaskan bahwa salah satu kunci utama terhindarnya hambatan program pemberdayaan adalah terciptanya

⁸³ Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (Expanded ed.). Russell Sage Foundation.

komunikasi yang efektif dan cair antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan anggota kelompok tani⁸⁴.

Lebih jauh, kehadiran penyuluh di luar batasan jam kerja formal ini terbukti sukses meruntuhkan jarak psikologis antara institusi birokrasi dan rakyat kecil, yang dalam perspektif sosiologi diartikan sebagai proses pembentukan Modal Sosial (*Social Capital*). Interaksi yang mengedepankan kekeluargaan ini menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) antara petani dan pemerintah. Modal sosial inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi anggota Kelompok Tani Pokusma agar bersikap lebih kooperatif dalam mengadopsi inovasi budidaya (seperti Sekolah Lapang) dan berani melaporkan permasalahan pasar di lapangan tanpa adanya rasa segan maupun curiga.

⁸⁴ Astiti, (2021). *Loc. Cit.* Hal. 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani pada tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan telah diimplementasikan secara komprehensif melalui tiga pilar utama. Secara khusus bagi Kelompok Tani Pokusma, strategi ini menghasilkan efisiensi operasional yang nyata, namun terancam oleh kegagalan struktural di tingkat makro wilayah.

Pertama, pada pilar penciptaan iklim pendukung (*enabling*), DKPP berhasil membangun ekosistem sosial yang kondusif melalui penjadwalan kunjungan penyuluh dan perluasan akses informasi via *WhatsApp*. Secara spesifik pada Kelompok Tani Pokusma, fleksibilitas penyuluh yang proaktif melakukan pendampingan pada malam hari sukses meruntuhkan jarak psikologis, menumbuhkan modal sosial berupa rasa saling percaya (*trust*), dan menjaga kerukunan di antara 20 anggota aktifnya.

Kedua, pada pilar peningkatan kapasitas (*empowering*), pemerintah daerah menyalurkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) bersyarat dan Bimbingan Teknis berbasis Sekolah Lapang. Bagi Kelompok Tani Pokusma, intervensi logistik dan edukasi ini bertindak sebagai mekanisme mitigasi risiko yang krusial. Bantuan tersebut berhasil mereduksi 50% biaya operasional dan mendongkrak hasil panen cabai keriting Pokusma hingga 88,5% (dari 130 kuintal di 2024 menjadi 245 kuintal di 2025), meskipun memunculkan *trade-off* berupa menurunnya produksi sayuran pendamping akibat pemusatan fokus di lahan komunal (kelompok) seluas 8 hektare yang mereka olah.

Ketiga, pada pilar perlindungan (*protecting*), capaian dinas menunjukkan keberhasilan yang terbelah (parsial). Di satu sisi, program inovatif "Cabai Corner" terbukti sukses melindungi hasil panen cabai Kelompok Tani Pokusma dari permainan anjloknya harga tengkulak saat panen raya. Namun di sisi lain, penggunaan lahan tani tanpa mengantongi izin dari pemangku otoritas tata ruang

(BP Batam) membuat 8 hektare lahan garapan Kelompok tani Pokusma hidup dalam ketidakpastian hukum dan rentan terhadap penggusuran paksa.

Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan operasional petani oleh DKPP telah berhasil di tingkat mikro bagi Kelompok Tani Pokusma. Namun, capaian ini terdistorsi secara sistemik akibat ketiadaan legalitas lahan yang diperparah oleh tragedi penggusuran di lumbung pangan Pulau Rempang, sehingga secara agregat makro, produksi tanaman pangan daerah di tahun 2025 justru mengalami penurunan tajam.

B. Saran

Merespons dinamika temuan penelitian terkait kesenjangan antara keberhasilan penguatan kapasitas di tingkat Kelompok Tani Pokusma dan kegagalan struktural di tingkat makro, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dirumuskan bagi para pemangku kepentingan.

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam

Penambahan rasio tenaga penyuluh lapangan menjadi sebuah urgensi yang mendesak, mengingat beban kerja penyuluh saat ini sangat tidak ideal untuk mengawal intensitas pendampingan. Selain itu, DKPP perlu segera memfasilitasi wacana modernisasi melalui adopsi *Smart Farming* berbasis *Internet of Things* (IoT) ke dalam lahan garapan Kelompok Tani Pokusma untuk mengefisiensikan sistem irigasi, sekaligus memperluas jangkauan serapan pasar dari program "Cabai Corner" agar seluruh hasil panen komoditas hortikultura Pokusma dapat terselamatkan saat harga pasar nasional anjlok.

2. Kelompok Tani Pokusma

Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan modal pemerintah harus mulai diimbangi dengan upaya transformasi status kelembagaan. Pengurus dan anggota Pokusma sangat disarankan untuk merintis peningkatan status dari sekadar kelompok tani biasa menjadi entitas badan usaha seperti Koperasi Pertanian. Melalui koperasi, hambatan keterbatasan

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dapat diatasi melalui skema iuran pengadaan mandiri yang akan memperkuat daya tawar komersial mereka.

Dalam menghadapi tingginya kerentanan legalitas lahan, Kelompok Tani Pokusma disarankan untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa lahan yang mereka garap adalah lahan yang legal atau memiliki izin resmi. Langkah ini dapat diwujudkan melalui inisiatif pengajuan permohonan izin pemanfaatan lahan secara kolektif kepada otoritas pemangku wilayah, sehingga kelompok memiliki pijakan hukum yang kuat untuk terus memproduksi pangan tanpa bayang-bayang ketakutan akan penggusuran.

Di samping itu, mengingat mayoritas anggota Pokusma telah berusia di atas 40 tahun, kelompok ini harus lebih terbuka dan proaktif dalam menyosialisasikan potensi ekonomi sektor hortikultura kepada generasi muda di lingkungan Kelurahan Sungai Pelunggut guna mencegah matinya regenerasi petani perkotaan.

3. Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Sinkronisasi kebijakan tata ruang merupakan kunci utama keselamatan sektor pertanian daerah. Sebagai pemegang otoritas absolut atas tata kelola wilayah, Pemko dan BP Batam dituntut untuk segera menerbitkan kebijakan alokasi kawasan sentra pertanian permanen (*Food Estate*) atau secara konkret menerbitkan izin penggunaan lahan secara resmi bagi kelompok tani eksisting seperti Pokusma. Penyediaan legalitas lahan ini adalah solusi tunggal yang paling fundamental untuk menghentikan ancaman penggusuran paksa. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum atas ruang produksi tersebut, seluruh program pemberdayaan teknis dan subsidi anggaran dari dinas hanya akan menjadi upaya sesaat yang tidak mampu menjamin keberlanjutan ketahanan pangan Kota Batam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Katagori Buku

- Badan Pangan Nasional. (2024). *Peta ketahanan dan kerentanan pangan nasional tahun 2024*. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Cepi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023).
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. (2024). *Rancangan akhir rencana kerja (Renja) dinas ketahanan pangan dan pertanian tahun 2025*. Pemerintah Kota Batam. <https://batam.go.id/ipkd/wp-content/uploads/2025/10/11.DINAS-KETAHANAN-PANGAN.pdf>
- Kartasasmita, G. (1995). *Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat*.
- Kementerian Pertanian. (2019). *Indeks ketahanan pangan Indonesia 2018*.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (Expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Rahayu, I. P. G. D. S. (2022). *Model pemberdayaan masyarakat*. Ahlimedia Press.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1-12.
- Pemerintah Kota Batam. (2025). *Profil Kota Batam 2025*. Batam: Pemerintah Kota Batam.
- Sukino. (2013). *Membangun pertanian dengan pemberdayaan masyarakat tani: Terobosan menanggulangi kemiskinan*. Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi 3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

b. Katagori Jurnal & Artikel

- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). *Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya*. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/download/82/20>

- 'Azhima, M. F., Deniar, S. M., Nugraha, T. C., & Salahudin, S. (2023). *Six pillars of global food security in Indonesia: A systemic literature review*. *Sosiohumaniora*, 25(3), 419–429. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.43549>
- Erlina, E., Vestikowati, E., & Sujai, I. (n.d.). *Peran dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dalam pemberdayaan kelompok tani Tunas Mekar Jaya Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar*.
- Fitri Adila Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I. (2024). *Pemberdayaan kelompok tani dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya*. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 52–59. <https://doi.org/10.62951/manfaat.v1i3.83>
- Nippi, A. T. (2019). *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*. *Meraja journal*, 2(1), 284691.
- Maxwell, S. (2001). *The evolution of thinking about food security*. In S. Devereux & S. Maxwell (Eds.), *Food security in sub-Saharan Africa* (pp. 13–31). <https://doi.org/10.3362/9781780440170.002>
- Ratnawati, Mappamiring, & Ansyari Mone. *Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 3, Desember 2017, hlm. 342–358. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riwanda Sinaga, R., Suswatiningsih, T. E., & Purwandari, I. (2024). *Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani di Kalurahan Semoyo Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul*.
- Rozaki, Z., Siregar, H., Pratama, I. A., & Istiyanti, E. (2023). *Food security, diversification, and inequality: Indonesia in the era of economic recovery and high price trends*. In M. J. Cohen (Ed.), *Advances in food security and sustainability* (Vol. 8, pp. 43–94). Elsevier.
- Sakung, J. M., Lukman, L., Rahman, A., & Dewi, N. U. (2024). *Pemberdayaan kelompok tani Desa Simoro dalam mengatasi kelebihan produksi labu siam melalui pembuatan pangan fungsional untuk anak stunting*. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1539–1547. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1885>

c. Kategori Peraturan

Peraturan Walikota Batam No. 33 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan sistem kerja dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam.

Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 62 Tahun 2024 tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Rome Declaration on World Food Security. (1996).

Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 56 Tahun 2026

LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1. 1 Surat Rekomendasi Penelitian Terbitan DPMPTSP

	PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.go.id BATAM CENTRE - BATAM Kode Pos: 29461
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 172/RPPT/DPMPTSP-BTM/01/V/2026	
Dasar :	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41); 4. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Menimbang :	Permohonan rekomendasi penelitian Universitas Riau Kepulauan Nomor : 031/U/FISIPOP-UNRIKAV/2026 tanggal 2026-05-25 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :	
Nama Pemohon :	MUHAMMAD SATIO
Nama Perguruan Tinggi Jurusan Jenjang :	Universitas Riau Kepulauan Ilmu Pemerintahan Strata 1
Tujuan Penelitian No KTM :	Untuk mengetahui strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025. 221160043
Untuk :	1) Melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian "STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM PADA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKUTURA MELALUI PEMBERDAYAAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Gas Alam Jaya)". 2) Lokasi penelitian: Jl. Raja Ali H. No.3, Sei Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, . 3) Waktu/Lama penelitian : Selama 6 (enam) bulan terhitung rekomedasi ini dibuat. 4) Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat. 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
Rekomendasi penelitian ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
Ditetapkan di : Batam Pada Tanggal : 26 Mei 2026	
An. WALIKOTA BATAM KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	
Ditandatangani secara digital oleh REZA KHADAFY,S.STP.MPA NIP. 19800619 1999121002	
Terbusan : 1. Walikota dan Wakil Walikota Batam 2. Arsip	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara	

Lampiran Gambar 1. 2 Surat Rekomendasi Penelitian Terbitan DPMPTSP

	PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.go.id BATAM CENTRE - BATAM Kode Pos: 29461
Nomor : 172/RPPT/DPMPTSP-BTM/01/V/2026	Batam, 26 Mei 2026
Lampiran : -	
Hai : Rekomendasi Penelitian	
Kepada Yth : Kepala di Tempat	
Menindaklanjuti permohonan rekomendasi penelitian nomor : 031/U/FISIPOL-UNRIKA/V/2026 tanggal 2026-05-25 perihal Permohonan Izin Penelitian.	
Bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 172/RPPT/DPMPTSP-BTM/01/V/2026 atas nama MUHAMMAD SATIO.	
Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
An. WALIKOTA BATAM KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	
Ditandatangani secara digital oleh REZA KHADAFY.S.STP.MPA NIP. 19800619 1999121002	
Tembusan : 1. Walikota dan Wakil Walikota Batam 2. Arsip	
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Gambar 1. 3 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id
Email: info@unrika.ac.id, ipem@fisip.unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

Nomor : 031/U/FISIPOL-UNRIKA/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Batam

Di
Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Satio
NPM : 221160043
Jenjang Pendidikan : Strata 1

Bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan Batam Semester Genap 2025/2026 yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) dan membutuhkan data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk penyusunan tugas akhir perkuliahan tersebut dengan Judul Skripsi:

**"STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM PADA
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HARTIKUTURA MELALUI PEMBERDAYAAN
KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN 2025 (STUDI KASUS KELOMPOK TANI GAS
ALAM JAYA)"**

Mohon kiranya kepada Bapak/ Ibu berkenan membantu Mahasiswa kami dalam pengumpulan data, agar dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Batam, 21 Mei 2026

Dekan FISIPOL


Askarmin Harun, S.Sos., M.Si

Lampiran Gambar 1. 4 Pedoman wawancara

Nama Informan	
Tanggal Penelitian	
Waktu Penelitian	
Lokasi Wawancara	
Kontak Informan	
Jabatan Informan	Anggota Kelompok Tani
Judul Penelitian	Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kota Batam Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)
Rumusan Masalah	Bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025?
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025.

Indikator	Sub-indikator	Kisi-kisi Pertanyaan
<i>Enabling</i>	Mendorong masyarakat untuk berkembang.	Apakah kelompok tani mendapatkan dorongan atau dukungan untuk berkembang dari dinas?
	Intensitas Komunikasi dan pendampingan oleh dinas	Apakah Dinas/Penyuluh sering berkomunikasi dengan kelompok Bapak? Seberapa sering intensitas pendampingan yang mereka lakukan ke lahan?
	Akses informasi	Apakah akses informasi dari Dinas (misalnya lewat grup WhatsApp) mudah didapatkan? Informasi apa yang paling sering diberikan oleh Dinas?
<i>Empowering</i>	Jumlah distribusi bantuan sarana produksi	Berapa banyak jumlah bantuan sarana produksi yang kelompok Anda terima dari Dinas pada tahun 2025, dan apa saja jenisnya?
	Frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis/ pelatihan	Informasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh kelompok tani?
<i>Protecting</i>	Program perlindungan harga jual hasil produksi	Apakah kelompok Anda merasakan adanya campur tangan atau program perlindungan dari Dinas terkait harga jual hasil panen agar tidak dipermainkan tengkulak?
	Program perlindungan lahan	Apakah ada jaminan, dukungan, atau program bantuan dari Dinas terkait perlindungan status lahan yang sedang kelompok Anda garap saat ini?

1. Bagaimana awal terbentuknya Kelompok Tani Pokusma?
2. Jenis tanaman apa yang kelompok tani ini produksi?
3. Bagaimana kondisi produksi sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan dari dinas?
4. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ditahun 2025?
5. Bantuan apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani?
6. Apakah ada instansi lain yang memberi bantuan kepada kelompok tani?
7. Apakah kelompok tani merasa lebih mandiri setelah mendapatkan pendampingan dari dinas?
8. Apa harapan kelompok tani terhadap pemerintah untuk pengembangan hortikultura di masa mendatang?
9. Apa harapan dan rekomendasi untuk pemberdayaan Kelompok Tani kedepannya?

Lampiran Gambar 1. 5 Pedoman wawancara

Nama Informan		
Tanggal Penelitian		
Waktu Penelitian		
Lokasi Wawancara		
Kontak Informan		
Jabatan Informan	Kepala Bidang	
Judul Penelitian	Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kota Batam Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)	
Rumusan Masalah	Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025?	
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025.	
Indikator	Sub-indikator	Kisi-kisi Pertanyaan
Enabling	Mendorong masyarakat untuk berkembang.	Bagaimana strategi dinas dalam mendorong perkembangan kelompok tani hortikultura di Kota Batam?
	Intensitas Komunikasi dan pendampingan oleh dinas	Bagaimana kebijakan dan strategi Dinas dalam mengatur intensitas komunikasi dan jadwal pendampingan langsung (turun ke lapangan) bagi kelompok tani?
	Akses informasi	Apa saja platform atau sistem (misalnya: Grup WhatsApp tingkat kecamatan) yang dibangun Dinas untuk menjamin keterbukaan akses informasi terkait program pertanian bagi petani?
Empowering	Jumlah distribusi bantuan sarana produksi	Bagaimana target, realisasi jumlah, dan jenis distribusi bantuan sarana produksi (saprota) yang disalurkan kepada kelompok tani di tahun 2025?
	Frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis/ pelatihan	Berapa target frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan yang diselenggarakan Dinas dalam satu tahun anggaran untuk kelompok tani?
Protecting	Program perlindungan harga jual hasil produksi	Bagaimana bentuk program nyata atau intervensi Dinas (misalnya melalui Kios Pangan atau Cabai Corner) dalam melindungi harga jual panen agar petani tidak rugi saat panen raya?
	Program perlindungan lahan	Apa langkah advokasi atau program prioritas Dinas untuk memberikan kejelasan dan perlindungan lahan pertanian di tengah maraknya alih fungsi lahan di Kota Batam?

1. Bagaimana dinas melihat potensi kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan daerah?
2. Bagaimana proses perencanaan program pemberdayaan kelompok tani dilakukan oleh dinas?
3. Apa tujuan dinas dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani?
4. Apakah seluruh kelompok tani memperoleh akses program yang sama?
5. Bagaimana respons kelompok tani terhadap program-program yang diberikan dinas?
6. Apakah pemberdayaan kelompok tani dipilih sebagai strategi utama dalam peningkatan produksi hortikultura? Kalau iya kenapa hal ini dipilih?
7. Apa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi?
8. Apakah terdapat inovasi baru yang diterapkan dinas dalam pemberdayaan kelompok tani tahun 2025?
9. Apa kendala/hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Tani?
10. Menurut ibu apakah strategi pemberdayaan yang dilakukan sudah efektif dalam meningkatkan produksi tanaman pangan?
11. Apa harapan dan rekomendasi untuk pemberdayaan Kelompok Tani kedepannya?

Lampiran Gambar 1. 6 Pedoman wawancara

Nama Informan		
Tanggal Penelitian		
Waktu Penelitian		
Lokasi Wawancara		
Kontak Informan		
Jabatan Informan	Petugas lapangan	
Judul Penelitian	Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kota Batam Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)	
Rumusan Masalah	Bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025?	
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025.	
Indikator	Sub-indikator	Kisi-kisi Pertanyaan
Enabling	Intensitas Komunikasi dan pendampingan oleh dinas	Berapa frekuensi kunjungan atau seberapa tinggi intensitas komunikasi yang Anda lakukan secara langsung ke kelompok tani binaan dalam sebulan?
	Akses informasi	Bagaimana cara teknis Anda di lapangan untuk menyalurkan akses informasi penting (bantuan, harga pasar, cuaca) agar cepat dipahami oleh petani?
Empowering	Jumlah distribusi bantuan sarana produksi	Berdasarkan pengawasan di lapangan, seberapa merata dan memadai jumlah distribusi bantuan sarana produksi yang telah diterima oleh kelompok tani binaan Anda?
	Frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis/ pelatihan	Seberapa sering (frekuensi) Anda mengadakan atau memandu langsung kegiatan bimbingan teknis/sekolah lapang di lahan kelompok tani?
Protecting	Program perlindungan harga jual hasil produksi	Bagaimana langkah riil Anda dalam memantau harga di lapangan untuk membantu mencegah petani menjual panen dengan harga terlalu murah ke tengkulak?
	Program perlindungan lahan	Apa keluhan riil yang paling sering Anda dengar terkait lahan, dan bagaimana Anda merespons jika lahan kelompok binaan Anda menghadapi ancaman pengusuran?

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam setiap kegiatan pemberdayaan?
2. Apa kendala yang paling sering ditemui saat melakukan pendampingan kepada petani?
3. Bagaimana kemampuan kelompok tani dalam memanfaatkan bantuan yang telah diberikan?
4. Bagaimana proses pengawasan penggunaan bantuan pertanian di lapangan?
5. Menurut pengamatan petugas lapangan, apa kebutuhan utama kelompok tani untuk meningkatkan produksi hortikultura?
6. Apa harapan dan rekomendasi untuk pemberdayaan Kelompok Tani kedepannya?

Lampiran Gambar 1. 7 Pedoman wawancara

Nama Informan		
Tanggal Penelitian		
Waktu Penelitian		
Lokasi Wawancara		
Kontak Informan		
Jabatan Informan	Ketua Kelompok Tani	
Judul Penelitian	Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Pada Pemberdayaan Kepada Kelompok Tani Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kota Batam Tahun 2025 (Studi Kasus Kelompok Tani Pokusma)	
Rumusan Masalah	Bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025?	
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam memberdayakan Kelompok Tani ditahun 2025.	
Indikator	Sub-indikator	Kisi-kisi Pertanyaan
Enabling	Mendorong masyarakat untuk berkembang.	Apakah kelompok tani mendapatkan dorongan atau dukungan untuk berkembang dari dinas?
	Intensitas Komunikasi dan pendampingan oleh dinas	Apakah Dinas/Penyuluh sering berkomunikasi dengan kelompok Bapak? Seberapa sering intensitas pendampingan yang mereka lakukan ke lahan?
	Akses informasi	Apakah akses informasi dari Dinas (misalnya lewat grup WhatsApp) mudah didapatkan? Informasi apa yang paling sering diberikan oleh Dinas?
Empowering	Jumlah distribusi bantuan sarana produksi	Berapa banyak jumlah bantuan sarana produksi yang kelompok Anda terima dari Dinas pada tahun 2025, dan apa saja jenisnya?
	Frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis/ pelatihan	Informasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh kelompok tani?
Protecting	Program perlindungan harga jual hasil produksi	Apakah kelompok Anda merasakan adanya campur tangan atau program perlindungan dari Dinas terkait harga jual hasil panen agar tidak dipermainkan tengkulak?
	Program perlindungan lahan	Apakah ada jaminan, dukungan, atau program bantuan dari Dinas terkait perlindungan status lahan yang sedang kelompok Anda garap saat ini?

1. Bagaimana awal terbentuknya Kelompok Tani Pokusma?
2. Jenis tanaman apa yang kelompok tani ini produksi?
3. Bagaimana kondisi produksi sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan dari dinas?
4. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ditahun 2025?
5. Bantuan apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani?
6. Apakah ada instansi lain yang memberi bantuan kepada kelompok tani?
7. Apakah kelompok tani merasa lebih mandiri setelah mendapatkan pendampingan dari dinas?
8. Apa harapan kelompok tani terhadap pemerintah untuk pengembangan hortikultura di masa mendatang?
9. Apa harapan dan rekomendasi untuk pemberdayaan Kelompok Tani kedepannya?

Lampiran Gambar 1. 8 Dokumentasi Wawancara dengan ketua kelompok tani Pokusma



Lampiran Gambar 1. 9 Dokumentasi Wawancara dengan staf DKPP Kota Batam



Lampiran Gambar 1. 10 Dokumentasi Wawancara dengan penyuluh Pertanian



Lampiran Gambar 1. 11 Bantuan bibit cabai Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma



Lampiran Gambar 1. 12 Bantuan Pupuk Dari DKPP Kota Batam kepada Kelompok Tani Pokusma



Lampiran Gambar 1. 13 Kebun olahan Ketua Kelompok tani Pokusma



Lampiran Gambar 1. 14 Gudang Penyimpanan Keompok tani Pokusma



Lampiran Gambar 1. 15 FGD Kelompok tani dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam



